

**ANALISIS KELEMBAGAAN DAN *STAKEHOLDER* DALAM USAHA
PENANGKAPAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN DI KUALA
TELADAS, TULANG BAWANG**

(Tesis)

Oleh

WINARTO SANTOSA

NPM 2320041005



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN WILAYAH PESISIR DAN LAUT
PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS KELEMBAGAAN DAN *STAKEHOLDER* DALAM USAHA PENANGKAPAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN DI KUALA TELADAS, TULANG BAWANG

Oleh

WINARTO SANTOSA

Usaha penangkapan rajungan menghadapi tantangan keberlanjutan akibat karakteristiknya sebagai sumber daya milik bersama dan adanya persaingan antar aktor. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kelembagaan Kelompok Usaha Bersama, memetakan hubungan antar *stakeholder* dan merumuskan strategi pengelolaan usaha penangkapan rajungan berkelanjutan di Kampung Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan terlibat, diskusi kelompok terfokus dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan mengkaji kelembagaan kelompok usaha bersama dan analisis *stakeholder* menggunakan metode Mactor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelompok Usaha Bersama berperan penting sebagai wadah kolektif bagi nelayan untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan mengakses sumber daya rajungan. Terdapat 11 aktor kunci dan 5 tujuan dimana Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung merupakan aktor dengan pengaruh terkuat. Pemerintah desa, penyuluh perikanan dan LSM Mitra Bentala berperan penting sebagai aktor sentral yang menjembatani kepentingan berbagai pihak. Nelayan menunjukkan tingkat divergensi dan ambivalensi tertinggi. Kebijakan penangkapan rajungan sesuai kriteria ukuran, peningkatan kesejahteraan nelayan, serta sosialisasi dan pengawasan memiliki tingkat mobilisasi tertinggi. Kebijakan pengendalian penangkapan berbasis kuota mendapat penentangan signifikan dari nelayan, pembina, dan kelompok usaha bersama. Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan, koordinasi dan kolaborasi dalam implementasi kebijakan yang dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan semua *stakeholder* menjadi kunci untuk mendukung keberlanjutan usaha penangkapan rajungan yang berkelanjutan.

Kata kunci : Kelembagaan, Mactor, Nelayan, Rajungan, *Stakeholder*.

ABSTRACT

INSTITUTIONAL AND STAKEHOLDERS ANALYSIS IN SUSTAINABLE BLUE SWIMMING CRAB FISHING EFFORTS IN KUALA TELADAS, TULANG BAWANG

By

WINARTO SANTOSA

The blue swimming crab fishing effort faces sustainability challenges due to its characteristics as a common property resource there are the competitions between actors. This study aims to analyze the institution structure of the Joint Business Group, analyze the interaction and mapping of the relationships between stakeholders, and formulate a management strategy for sustainable blue swimming crab fishing effort in Kuala Teladas Village, Tulang Bawang Regency. This research was a qualitative study whose data collection was carried out through in-depth interviews, participant observation, focus group discussion, and documentation study. Data were analyzed to examine the institution and organization structure of the group and stakeholders analysis using the Mactor method. The study results show that the Joint Business Group is vital as a collective forum for fishermen to discuss, share information, and access blue swimming crab resources. There were 11 key actors and 5 objectives where the Sustainable Blue Swimming Crab Fisheries Management Team and Marine and Fisheries Service of Lampung Province are the actors with the strongest influence. Village government, fisheries extension and NGO Mitra Bentala played an important role as a central actor that bridges the objectives of stakeholders. Fishermen show the highest levels of divergence and ambivalence. The blue swimming crab fishing policy according to size criteria, improving fishermen's welfare, and socialization and supervision had the highest level of mobilization. The quota-based fishing control policy has received significant opposition from fishermen, businessmen, and joint business groups. Increasing the institutional capacity of fishermen, collaboration, and coordination in implementing policies carried out in stages by involving all stakeholders were the keys to supporting the sustainability of sustainable blue swimming crab fishing efforts.

Keywords: Blue Swimming Crab, Fishermen, Institutions, Mactor, Stakeholders.

**ANALISIS KELEMBAGAAN DAN *STAKEHOLDER* DALAM USAHA
PENANGKAPAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN DI KUALA
TELADAS, TULANG BAWANG**

Oleh

Winarto Santosa

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS**

Pada

**Program Studi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut
Pascasarjana Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN WILAYAH PESISIR DAN LAUT
PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis

**ANALISIS KELEMBAGAAN DAN
STAKEHOLDER DALAM USAHA
PENANGKAPAN RAJUNGAN
BERKELANJUTAN DI KUALA TELADAS,
TULANG BAWANG**

Nama

Winarto Santosa

Nomor Pokok Mahasiswa

2320041005

Program Studi

Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut

Fakultas

Pascasarjana Multidisiplin



1. Komisi Pembimbing

Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.

NIP. 19740222 200312 1 001

Dr. Qadar Hasani, S.Pi., M.Si.

NIP. 19790118 200212 1 002

**2. Ketua Program Studi Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut
Universitas Lampung**

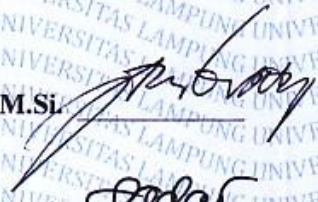
Dr. Nur Efendi, S.Sos., M.Si.

NIP. 19691012 199512 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.



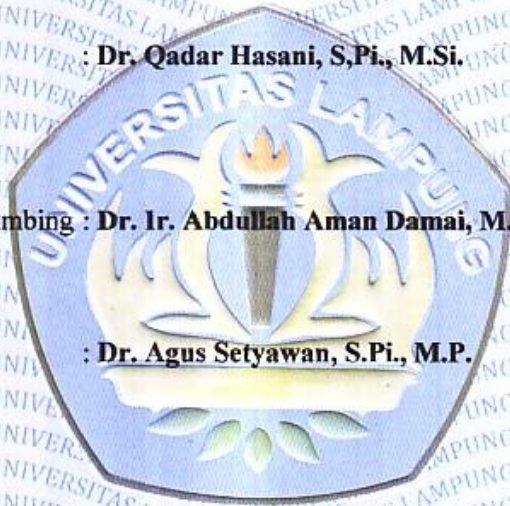
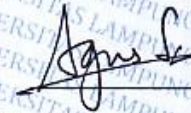
Sekretaris : Dr. Qadar Hasani, S.Pi., M.Si.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si**

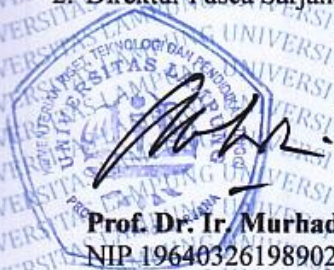


Anggota : Dr. Agus Setyawan, S.Pi., M.P.



2. Direktur Pasca Sarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001



Tanggal Lulus Ujian Tesis: 25 November 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **“ANALISIS KELEMBAGAAN DAN STAKEHOLDER DALAM USAHA PENANGKAPAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN DI KUALA TELADAS, TULANG BAWANG”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau mengutip atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Winarto Santosa
NPM 2320041005

RIWAYAT HIDUP



Winarto Santosa lahir di Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 29 Desember 1981 dari Ayah bernama Wiyadi dan Ibu Marsidah. Penulis merupakan anak ke empat dari enam bersaudara. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD YPPK 1 Kamal, Maluku Tengah pada tahun 1993, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri Kamal, Maluku Tengah, pada tahun 1996, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Umum (SMU) di SMU Negeri 4 Madiun, Jawa Timur pada tahun 1999. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi (S1) di Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang dan lulus pada tahun 2014 dengan judul skripsi Studi Pemetaan Daerah Konflik Alat Tangkap Nelayan Sarang Kabupaten Rembang. Pada tahun 2023 penulis melanjutkan pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut (MWPL) Universitas Lampung. Pada tahun 2024, untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si.), penulis menyelesaikan tesis dengan judul **“Analisis Kelembagaan dan Stakeholder dalam Usaha Penangkapan Rajungan Berkelanjutan di Kuala Teladas, Tulang Bawang”**.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada:

1. **Kedua orang tua**, yang senantiasa menjadi sumber doa, restu, dan kekuatan dalam setiap langkah hidupku.
2. **Istriku, Fatmawati, SE.** atas kasih sayang, perhatian, serta nasihat dan semangatnya yang tiada henti menemani perjuanganku.
3. **Anak-anakku, Nadhifah Azka Santosa dan Nizam Ahnaf Santosa**, yang menjadi pelipur lara dan sumber inspirasiku dalam menggapai cita-cita.
4. **Seluruh keluarga besar dan saudara**, atas cinta dan dukungan yang selalu menguatkan.
5. **BRPPUPP Palembang**, sebagai instansi tempat mengabdikan, atas dukungan yang diberikan selama proses studi magister ini.
6. **Teman-teman Penyuluh Perikanan Lampung**, yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh dalam perjalanan ini.
7. **Teman-Teman Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut Universitas Lampung Angkatan 2023**, yang menjadi sahabat dalam belajar dan berbagi pengalaman selama masa studi.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul “**Analisis Kelembagaan dan Stakeholder dalam Usaha Penangkapan Rajungan Berkelanjutan di Kuala Teladas, Tulang Bawang**”, adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut, Universitas Lampung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
2. Dr. Nur Efendi, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut;
3. Prof. Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si., selaku Pembimbing Utama atas bimbingan, dukungan, ilmu yang berharga, arahan, serta masukan yang konstruktif dan telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan penuh dedikasi hingga terselesaikannya tesis ini;
4. Dr. Qadar Hasani, S.Pi., M.Si., selaku Pembimbing Kedua atas bimbingan, dukungan, ilmu yang berharga, arahan, serta masukan yang konstruktif dan telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan penuh dedikasi hingga terselesaikannya tesis ini;
5. Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si., selaku Pembahas Utama, atas masukan dan saran-saran yang sangat berharga dan konstruktif, yang memberikan kontribusi signifikan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Dr. Agus Setyawan, S.Pi., M.P., selaku Pembahas Utama, atas masukan dan saran-saran yang sangat berharga dan konstruktif, yang memberikan kontribusi signifikan dalam penyelesaian tesis ini.

7. Dr. Supono, S.Pi., M.Si. (Almarhum), yang dengan sabar dan bijaksana selalu memberikan saran yang konstruktif dan memberikan kontribusi signifikan dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dan menempatkan almarhum di tempat terbaik di sisi-Nya;
8. Seluruh Dosen Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan telah mendidik penulis;
9. Bapak dan Ibu staf administrasi Pascasarjana Universitas Lampung;
10. Dr. Tjondroargo Tandio, S.E., M.M., CIAR atas waktu yang telah diberikan dalam mengajarkan analisis *stakeholder* dengan aplikasi MACTOR;
11. Direktur Mitra Bentala Rizani, SP., M.Si., beserta staf Destia Novasari, S.Hut., M.Hut, dan Rafles Sari, A.Md. atas dukungan, bantuan dan kontribusi yang diberikan selama proses penyusunan dan penyelesaian tesis;
12. Koordinator Penyuluh Perikanan Tulang Bawang, Fridudin, S.Pi. yang telah membantu dalam proses penelitian ini.
13. Beberapa masyarakat Kuala Teladas, Tulang Bawang atas bantuan dan partisipasinya selama melakukan penelitian di lokasi.
14. Istriku dan kedua anakku atas dukungan dan atas kasih sayang, perhatian, serta nasihat dan semangatnya yang tiada henti menemani perjuanganku;
15. Rezky Antoni, S.Kel., Kepala BRPPUPP Palembang, dan Nurwanti S.I.Kom., M.Si., Sub Koordinator Penyuluhan Satminkal BRPPUPP Palembang, atas dukungan dan bantuannya yang diberikan;
16. Penyuluh Perikanan Se-Provinsi Lampung;
17. Rekan-rekan bimbingan Prof. Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si., yaitu Pak Rizani, Bu Tuti, Nia, Darius, Indra dan Aldi yang telah bersama-sama melalui proses penyusunan tesis ini hingga selesai ;
18. Nurmaya, Like, Refi, Nurul, Arif, Bama, Okta, Andi serta rekan-rekan Magister MWPL Unila Tahun 2023, yang menjadi sahabat dalam belajar dan berbagi pengalaman selama masa studi.

Bandar Lampung, Desember 2024

Winarto Santosa

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Kerangka Pemikiran.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kelembagaan.....	7
2.2 <i>Stakeholder</i>	11
2.3 Usaha Penangkapan Rajungan Berkelanjutan	14
2.3.1 Rajungan	14
2.3.2 Alat tangkap rajungan	16
2.3.3 Pengelolaan perikanan berkelanjutan	19
III. METODE PENELITIAN	22
3.1 Waktu dan Tempat.....	22
3.2 Alat dan Bahan.....	22
3.3 Metode	23
3.4 Pengumpulan Data	23
3.5 Analisis Data.....	25
3.4.1 Analisis Kelembagaan	27
3.4.2 Analisis <i>Stakeholder</i>	28

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi	35
4.2 Kelembagaan KUB dalam Usaha Penangkapan Rajungan Berkelanjutan	38
4.2.1 Kelembagaan kelompok usaha bersama nelayan	38
4.2.2 Implementasi kebijakan pengelolaan rajungan	44
4.2.3 Peningkatan kapasitas KUB	49
4.3 Analisis <i>Stakeholder</i> dalam Usaha Penangkapan Rajungan Berkelanjutan	51
4.3.1 Identifikasi aktor dan tujuan penangkapan rajungan.....	51
4.3.2 Pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antar aktor	55
4.3.3 Hubungan aktor terhadap tujuan (objective) penangkapan rajungan berkelanjutan	62
4.3.4 Konvergensi antar aktor	66
4.3.5 Divergensi antar aktor	70
4.3.6 Ambivalensi Aktor	74
4.3.7 Jarak antara kebijakan	76
4.3.8 Skenario dan rekomendasi hubungan antar aktor	75
4.4 Strategi Pengelolaan Penangkapan Rajungan Berkelanjutan	77
4.4.1 Strategi pengelolaan berdasarkan kepentingan dan pengaruh <i>stakeholder</i>	77
4.4.2 Strategi pengelolaan berdasarkan konvergensi, divergensi dan ambivalensi	80
4.4.3 Skenario dan rekomendasi	84
V. SIMPULAN DAN SARAN	88
5.1 Simpulan	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Informan Penelitian	24
2. Jumlah alat tangkap berdasarkan alat tangkap dan mesin kapal.....	36
3. Komoditas unggulan hasil tangkapan nelayan.....	37
4. Produksi, nilai produksi, dan harga rata-rata rajungan di Kabupaten Tulang Bawang	37
5. Nama KUB di Kampung Kuala Teladas.....	38
6. Matriks strategi aktor usaha penangkapan rajungan berkelanjutan ...	52
7. Matrik tujuan (objective) usaha penangkapan rajungan berkelanjutan	52
8. Matrik MDI antar aktor dalam usaha penangkapan rajungan.....	54
9. Matrik 2MAO antara nilai posisi aktor terhadap tujuan	55
10. Matriks pengaruh langsung dan tidak langsung (MDII).....	56
11. Matriks posisi nilai yang tertimbang aktor terhadap tujuan.....	62
12. Matriks konvergensi nilai tertimbang antar aktor	66
13. Matriks divergensi nilai tertimbang antar aktor	70
14. Matriks ambivalensi aktor.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka pikir penelitian.....	6
2. Konstruksi rangkaian alat tangkap bubu lipat	17
3. Konstruksi rangkaian alat tangkap jaring kejer	18
4. Perikanan sebagai sebuah sistem	19
5. Lokasi penelitian Kampung Kuala Teladas	22
6. Proses analisa data kualitatif	26
7. Proses analisis MACTOR (<i>Matrix of Alliances and Conflicts Tactics, Objectives and Recommendations</i>).....	31
8. Input para aktor dan tujuan pada perangkat lunak Mactor	32
9. Peta kuadran pengaruh dan ketergantungan aktor	33
10. Peta admisnistratif Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang	35
11. Struktur organisasi KUB Nelayan di Kampung Kuala Teladas.....	39
12. Peta pengaruh dan ketergantungan antar aktor	58
13. Histogram mobilisasi aktor terhadap kebijakan (3MAO).....	64
14. Peta konvergensi antar aktor	68
15. Grafik konvergensi antar aktor	69
16. Peta divergensi antar aktor.....	72
17. Grafik divergensi antar aktor	73
18. Histogram ambivalensi aktor	75
19. Peta jarak antar kebijakan	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Panduan pertanyaan untuk nelayan, KUB, Pembina/Pengusaha rajungan, Pokmaswas dan Poklahsar	99
2. Panduan pertanyaan untuk Pemerintah Kampung, Penyuluh Perikanan, LSM Mitra Bentala, Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, dan Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Provinsi Lampung	101
3. Kuesioner penentuan peran aktor terhadap usaha penangkapan rajungan berkelanjutan.....	103
4. Kuesioner penentuan tingkat kepentingan para aktor terhadap usaha penangkapan rajungan berkelanjutan.....	105
5. Panduan bahan diskusi untuk Focus Group Discussion (FGD).....	107
6. Pengelompokan kategorisasi data	108
7. Notulensi Focus Group Discussion (FGD)	110
8. Dokumentasi	114

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rajungan (*Portunus pelagicus*) merupakan salah satu sumber daya perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi (Safira *et al.*, 2019). Rajungan yang berasal dari Indonesia diekspor ke Negara Amerika Serikat sebesar 60% dari total hasil tangkapan rajungan (Maulana, 2018). Jumlah produksi rajungan mengalami peningkatan yang sangat pesat setiap tahunnya. Rajungan menjadi salah satu komoditas ekspor perikanan penting di Indonesia. Provinsi Lampung termasuk dalam lima daerah utama penghasil rajungan, bersama dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Pada tahun 2021, volume ekspor rajungan menduduki peringkat kedua dengan total ekspor mencapai 1.577.612 kg di Provinsi Lampung (Cendrakasih *et al.*, 2023). Daerah utama penghasil komoditas rajungan di Provinsi Lampung terletak di Pesisir Timur Lampung diantaranya Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Nilai produksi rajungan di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2022 sebesar 2.747 ton dengan nilai Rp. 235.372.200.000 (BPS Kabupaten Tulang Bawang, 2023).

Wilayah potensial penangkapan rajungan di Kabupaten Tulang Bawang salah satunya berada di daerah Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas. Usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran rajungan merupakan mata pencaharian utama masyarakat Kuala Teladas. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya rajungan memiliki arti penting secara sosial dan ekonomi bagi kehidupan masyarakat di Kuala Teladas. Kegiatan penangkapan rajungan dapat memberikan keuntungan cepat (*quick yielding*). Namun, pada kenyataannya masih terdapat nelayan yang memiliki pendapatan rendah dan kurang sejahtera (Yunita *et al.*, 2017). Salah satu permasalahan yang dihadapi nelayan adalah ketergantungan

terhadap ketersediaan sumber daya dan kondisi alam. Peningkatan kebutuhan nelayan dapat meningkatkan tekanan yang mempercepat kerusakan sumber daya alam dan penurunan keanekaragaman hayati. Hal tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya *over fishing* (Mayu *et al.*, 2021). Apabila usaha penangkapan rajungan tersebut tidak memperhatikan keberlanjutan sumber dayanya, maka dapat berdampak terhadap penurunan populasi rajungan di masa mendatang.

Usaha penangkapan rajungan tidak dapat dipisahkan dari karakteristik sumber daya yang bersifat *common-pool resources* (CPRs) (Subianto *et al.*, 2016). CPRs merujuk pada sumber daya yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat atau kelompok. Konsep CPRs menggambarkan bahwa sumber daya memiliki dua karakteristik utama. Pertama adalah sifat persaingan dalam penggunaan, yang berarti ketika seseorang memanfaatkan sumber daya tersebut, maka kesempatan orang lain untuk memanfaatkan akan berkurang. Kedua adalah adanya biaya yang diperlukan untuk membatasi akses pihak lain dalam memanfaatkan sumber daya tersebut. Dengan kata lain, dibutuhkan upaya dan sumber daya tambahan untuk mengontrol siapa yang dapat menjadi penerima manfaat dari sumber daya tersebut (Ostrom *et al.*, 1999). Dalam pengelolaan rajungan terdapat tiga unsur penting yang memiliki kepentingan dan pengaruh yaitu masyarakat nelayan, pemerintah dan swasta (Kusuma dan Dewi, 2017). Ketiga unsur tersebut saling berkompetisi dalam penggunaan akses penangkapan rajungan yang lebih mengarah kepada penguasaan sumber daya rajungan.

Persaingan usaha penangkapan rajungan perlu diatur untuk menjamin keberlanjutan sumber daya. Beberapa peraturan pemerintah tentang pengelolaan rajungan sudah ada. Namun implementasinya kurang efektif, akibat dari lemahnya pengawasan dan penegakan hukum serta kurangnya kesadaran masyarakat (Abidin *et al.*, 2014). Peran kelembagaan lokal dan partisipasi masyarakat merupakan hal yang krusial dalam pembangunan berkelanjutan (Febryano *et al.*, 2015). Ostrom (1990) menekankan hubungan penting antara kelembagaan dan pembangunan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam. Kelembagaan lokal yang kuat dapat memberikan kerangka kerja yang jelas, menegakkan aturan yang ada, serta mendorong partisipasi aktif dari berbagai

pihak, untuk bersama-sama menjaga kelestarian sumber daya dan ekosistemnya. (Febryano *et al.*, 2014).

Salah satu kelembagaan lokal nelayan adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB). Kelembagaan KUB sekaligus organisasi mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai menjadi wadah kolektif bagi para nelayan untuk berdiskusi, belajar, bekerja sama, melakukan advokasi, serta berbagi informasi baik antar anggota maupun dengan para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, KUB membantu nelayan mengakses sumber daya, teknologi, dan pasar dengan lebih efektif melalui pendekatan kolaborasi. Uphoff (1986) menyatakan kelembagaan KUB tidak hanya mengatur interaksi antar anggota, tetapi juga berperan dalam menciptakan norma dan nilai yang mendukung kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pada akhirnya, KUB dapat meningkatkan kesadaran nelayan dalam usaha penangkapan rajungan berkelanjutan dan berkontribusi pada kesejahteraan nelayan.

Pengelolaan perikanan rajungan yang melibatkan berbagai pihak dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan dan pelaksanaannya menjadikannya sebagai sebuah sistem pengelolaan multiaktor. (Suryawati *et.al.*, 2023). Keterlibatan dan peran *stakeholder* dalam pengelolaan rajungan menjadi aspek yang krusial dalam tata kelolanya. Aktor tersebut terdiri dari instansi pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat hingga pelaku usaha. Pemerintah pusat mempunyai peran sebagai perencana dan pengawas kebijakan pengelolaan perikanan rajungan (Wijaya *et al.*, 2023). Komoditas rajungan mempunyai nilai yang sangat penting bagi pemerintah pusat dan perlu dikelola dengan baik. Dalam hal ini dapat dilihat dari peraturan yang telah dikeluarkan serta dokumen strategi pemanfaatan rajungan yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh para *stakeholder* dalam pengelolaan perikanan rajungan (Taurusman *et al.*, 2020). Atas permasalahan tersebut, maka diperlukan kajian tentang kelembagaan dan karakteristik *stakeholder* dan hubungan antar aktor dalam usaha pengelolaan rajungan berkelanjutan agar dapat dijadikan bahan rekomendasi yang tepat dalam tata kelola rajungan di Kabupaten Tulang Bawang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kelembagaan KUB dalam usaha penangkapan rajungan berkelanjutan di Kampung Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang?
2. Siapa saja *stakeholder* yang terlibat, bagaimana interaksi dan hubungan antar *stakeholder*?
3. Bagaimana strategi pengelolaan penangkapan rajungan berkelanjutan di Kampung Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan kepentingan dan pengaruh *stakeholder*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kelembagaan KUB dalam mendukung usaha penangkapan rajungan berkelanjutan di Kampung Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang.
2. Menganalisis interaksi dan memetakan hubungan antar *stakeholder*
3. Merumuskan strategi pengelolaan penangkapan rajungan berkelanjutan di Kampung Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan kepentingan dan pengaruh *stakeholder*?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain:

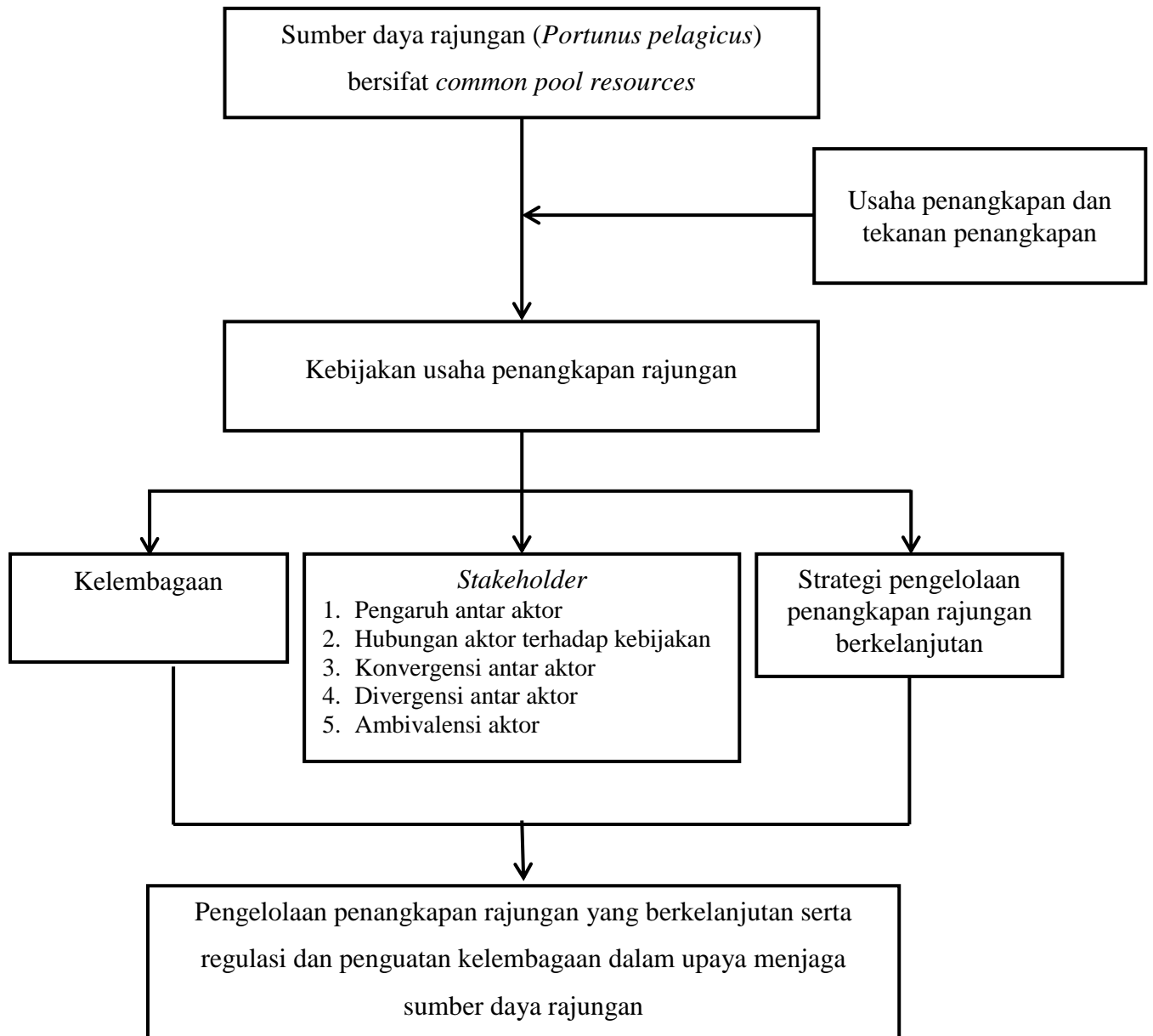
1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi dan menambah pengetahuan bagi penelitian sejenis terkait kelembagaan dan *stakeholder* dalam usaha penangkapan rajungan berkelanjutan.
2. Manfaat bagi *stakeholders* (pemerintah, masyarakat dan swasta) adalah sebagai informasi serta dasar dalam pengambilan kebijakan pengelolaan

rajungan berkelanjutan di tingkat daerah khususnya di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;

3. Manfaat bagi peneliti adalah meningkatkan kualifikasi keilmuan khususnya bidang kelembagaan dan serta sebagai pemenuhan persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Sains pada program studi Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut (MWPL) Universitas Lampung.

1.5 Kerangka Pemikiran

Rajungan merupakan salah satu sumber daya perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Rajungan yang berasal dari Indonesia di ekspor ke negara Amerika Serikat sebesar 60% dari total hasil tangkapan rajungan (Maulana, 2018). Salah satu provinsi yang menjadi produsen rajungan di Indonesia yaitu Provinsi Lampung. Daerah utama penghasil komoditas rajungan di Provinsi Lampung terletak di Pesisir Timur Lampung diantaranya Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Permintaan pasar ekspor yang terus meningkat setiap tahunnya, menjadikan rajungan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Karakteristik sumber daya rajungan yang bersifat *common pool resources* menyebabkan penangkapan rajungan semakin besar (*overfishing*). Apabila kegiatan penangkapan rajungan tersebut tidak memperhatikan keberlanjutan dari sumber dayanya, maka dapat berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di masa mendatang. Dalam penelitian ini, hal yang akan diamati peran kelembagaan dan pemetaan *stakeholder*. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian dilakukan analisis tentang peran *stakeholder* dan kelembagaan usaha penangkapan rajungan, yang nantinya dapat menjawab apa yang menjadi rumusan masalah diatas. Setelah dilakukan analisis, maka pada akhirnya dapat ditentukan bagaimana peran kelembagaan dan *stakeholder* dalam usaha pengelolaan rajungan berkelanjutan di Kuala Teladas. Kerangka pemikiran dari penelitian lebih jelas disajikan dalam Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kelembagaan

Kelembagaan adalah batasan yang dirancang oleh manusia untuk mengatur interaksi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Batasan ini dapat berbentuk aturan tidak resmi, seperti sanksi, adat, tradisi, dan kode etik, maupun aturan resmi, seperti konstitusi, hukum, dan hak kepemilikan (North, 1991). Menurut Wallis (2017) kelembagaan adalah aturan yang telah disepakati bersama tentang hubungan interaksi manusia dalam suatu kelompok atau organisasi serta beserta cara dan metode penegakannya. Kelembagaan selalu diindektikan dengan aturan dan batasan yang berlaku sebagai pedoman untuk seluruh anggota dalam kelompok masyarakat dalam mengatur interaksi dan hubungan saling ketergantungan satu sama lain (Ostrom, 1986). Bentuk kata dari kelembagaan adalah lembaga yang merujuk pada seperangkat aturan dalam suatu kelompok atau organisasi masyarakat yang bertujuan membantu anggotanya untuk berinteraksi dan bekerja sama mencapai tujuan bersama. (Suwarno *et al.*, 2022)

Menurut Menard dan Shirley (2008) kelembagaan adalah aturan, norma, dan batasan tertulis dan tidak tertulis yang dibuat manusia untuk mengurangi ketidakpastian dan mengendalikan lingkungannya. Hal ini mencakup (1) peraturan dan perjanjian tertulis yang mengatur hubungan kontrak dan tata kelola perusahaan, (2) konstitusi, undang-undang dan peraturan yang mengatur politik, pemerintahan, keuangan, dan masyarakat secara lebih luas, dan (3) kode etik dan norma perilaku yang tidak tertulis. Kelembagaan memiliki tiga karakteristik utama, yaitu hak kepemilikan (*property rights*), batas yurisdiksi (*jurisdictional boundaries*), dan aturan perwakilan (*rules of representation*) (Khalik *et al.*, 2011).

- a. hak kepemilikan (*property right*) merupakan hak legal yang dimiliki oleh individu atau kelompok atas suatu properti atau aset. Ini mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, dan mendisposisikan properti tersebut sesuai dengan hukum.
- b. batas yuridiksi (*jurisdictional boundary*) merupakan batas wilayah atau kewenangan suatu lembaga atau entitas hukum. Batas yuridiksi menentukan di mana suatu lembaga memiliki kekuasaan atau wewenang hukum untuk mengatur atau menegakkan hukum.
- c. aturan representasi (*rule of representation*) merupakan aturan atau prinsip yang mengatur cara suatu kelompok atau entitas diwakili atau dijalankan oleh perwakilan. Hal ini terkait dengan representasi dalam konteks politik, organisasi, atau lembaga lainnya.

Ketiga elemen ini penting dalam membentuk suatu kelembagaan suatu masyarakat atau organisasi. Kombinasi yang baik dari ketiga komponen dapat membentuk landasan yang kuat untuk fungsi dan interaksi yang efektif dalam suatu kelembagaan.

Kelembagaan didefinisikan sebagai aturan yang ditaati oleh anggota dalam kelompok masyarakat yang disepakati secara bersama untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Tujuan dari aturan tersebut adalah terciptanya suatu keteraturan dan kepastian interaksi berupa kegiatan ekonomi antara sesama anggota masyarakat. Keberadaan kelembagaan bersifat dinamis yaitu selalu berubah dan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam komunitas (Ostrom, 1990). Tingkatan aturan menurut (Ostrom, 2011) sebagai berikut:

1. *Operational rules* (aturan operasional) merupakan aturan-aturan yang mengatur tindakan sehari-hari dan interaksi langsung antar individu atau kelompok dalam suatu kelembagaan. Aturan operasional ini bersifat detail dan berfokus pada perilaku dan kegiatan harian. Mereka dapat mencakup penggunaan sumber daya, pembagian hasil, atau aturan terkait dengan kegiatan lainnya

2. *Collective choice rules* (aturan pilihan bersama) merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana keputusan kolektif dibuat dalam suatu kelembagaan. Ini melibatkan proses pengambilan keputusan terkait dengan perubahan aturan operasional, alokasi sumber daya, atau perubahan kebijakan lainnya. Aturan ini menetapkan mekanisme demokratis atau konsensus yang digunakan oleh anggota kelembagaan
3. *Constitutional rules* (aturan konstitusi) merupakan aturan-aturan tingkat tertinggi yang mendefinisikan struktur dasar kelembagaan. Aturan konstitusional ini menentukan bagaimana aturan operasional dan aturan pilihan bersama dapat diubah atau direvisi. Mereka membentuk dasar atau kerangka kerja untuk kelembagaan secara keseluruhan.

Kelembagaan dapat dipahami sebagai aturan main yang mencakup aspek struktural dan kultural. Kelembagaan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan organisasi semata. Sebagai kumpulan aturan dan hak yang jelas, kelembagaan menyediakan perlindungan, memberikan sanksi, membatasi (*constrain*), sekaligus memungkinkan (*enabling*) individu maupun kelompok untuk membuat pilihan mereka (Yusuf *et al.*, 2014). Pejovich (1999) menyatakan bahwa kelembagaan memiliki tiga komponen, yaitu:

1. Aturan formal adalah konstitusi, undang-undang, hukum adat, dan peraturan pemerintah lainnya. Mereka yang menentukan sistem politik sistem ekonomi dan sistem penegakan hukum. Otoritas pemerintah menegakkan aturan formal melalui sanksi seperti denda, penjara, dan eksekusi.
2. Aturan informal adalah tradisi, adat istiadat, nilai moral, keyakinan agama, dan semua norma perilaku lainnya yang telah teruji oleh waktu. Nilai-nilai tersebut mencerminkan persepsi umum masyarakat tentang kehidupan, norma kearifan di masa lalu, dan serangkaian norma saat ini. Oleh karena itu, lembaga-lembaga informal merupakan bagian dari warisan masyarakat yang kita sebut budaya.
3. Mekanisme penegakan yaitu sistem atau mekanisme yang bertanggung jawab untuk menegakkan aturan, baik itu aturan formal maupun informal. Mekanisme penegakan mencakup lembaga-lembaga penegak hukum,

prosedur pengadilan, dan berbagai cara lain untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan yang ada.

Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah lembaga masyarakat yang berfokus pada kegiatan usaha penangkapan ikan. Sebagai lembaga yang tidak berorientasi pada keuntungan, KUB berfungsi sebagai wadah bagi para nelayan untuk berdiskusi, belajar, bekerja sama, melakukan advokasi, serta berbagi informasi dengan pendekatan yang bersifat *bottom-up* maupun *top-down*. Latar belakang berdirinya KUB ini pada umumnya adalah berawal dari suatu permasalahan yang ingin dipecahkan oleh masyarakat. Permasalahan yang timbul itu diantaranya adalah menurunnya hasil tangkapan, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, tingkat kesejahteraan nelayan yang rendah sehingga membutuhkan solusi untuk mempertahankan usahanya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.14 Tahun 2012 tentang pedoman umum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan menjelaskan bahwa kelembagaan pelaku utama harus berdasarkan prinsip 1) kerakyatan atau keberpihakan, 2) kemandirian, 3) kemitraan dan kerjasam, 4) bertahap dan berkelanjutan, 5) partisipatif, dan 6) pemberdayaan.

Selama ini, pertumbuhan ekonomi cenderung hanya berfokus pada faktor-faktor fundamental yang dianggap telah menjadi paramater umum. Padahal faktor kelembagaan juga memainkan peranan yang penting dalam menghambat atau mendorong perkembangan ekonomi. Dalam sektor perikanan, kelembagaan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang memengaruhi cara pemerintah, koperasi, atau kelompok nelayan untuk mengelola hasil tangkapan dan berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya. Aturan tersebut mencakup regulasi pemerintah, kesepakatan bersama, dan norma masyarakat lokal. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan sejumlah indikator kelembagaan untuk Wilayah Pengelolaan Perikanan, termasuk keberadaan otoritas tunggal pengelolaan perikanan, tingkat sinergi antara kebijakan dan kelembagaan, kapasitas pemangku kepentingan, mekanisme pengambilan keputusan, kelengkapan aturan pengelolaan perikanan, kepatuhan terhadap prinsip perikanan

yang bertanggung jawab, konflik perikanan, serta rencana pengelolaan perikanan. Selain itu, terdapat pula indikator sosial, seperti partisipasi pemangku kepentingan, pengelolaan konflik perikanan, dan pemanfaatan pengetahuan lokal (Sukarniati dan Khoirudin, 2017).

2.2 Stakeholder

Secara umum, *stakeholder* dapat diartikan sebagai pemangku kepentingan. Pangaribuan (2021) mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu program. Dalam konteks kebijakan publik, *stakeholder* merujuk pada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh atau memiliki pengaruh terhadap suatu kebijakan. Madani (2011) menjelaskan bahwa aktor kebijakan adalah individu atau kelompok yang harus terlibat dalam seluruh proses analisis kebijakan publik, baik sebagai perumus maupun sebagai kelompok penekan yang secara aktif dan proaktif berinteraksi dalam analisis kebijakan. Sementara itu, Fauzi (2018) menyebutkan bahwa secara umum aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik terdiri atas aktor negara (*state*), aktor swasta (*private*), dan aktor masyarakat sipil (*civil society*). Ketiga jenis aktor ini memiliki peran penting dalam proses penyusunan kebijakan publik.

Menurut Handayani dan Warsono (2017) menerangkan bahwa, berdasarkan kekuatan, posisi, dan pengaruh *stakeholder* terhadap suatu isu, *stakeholder* dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori:

- a. *Stakeholder* primer (utama): Kelompok ini terdiri dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap suatu kebijakan, program, atau proyek. Mereka memainkan peran utama dalam proses pengambilan keputusan, seperti masyarakat, tokoh masyarakat, dan manajer publik.
- b. *Stakeholder* pendukung (sekunder): Kelompok ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan, program, atau proyek tertentu, tetapi menunjukkan perhatian (*concern*), kepedulian, dan keprihatinan. Kelompok ini dapat memengaruhi opini masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Contohnya meliputi lembaga pemerintah yang terkait namun tidak memiliki

tanggung jawab langsung, lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal, perguruan tinggi, dan pelaku usaha (badan usaha) yang relevan.

- c. *Stakeholder* kunci: Kelompok ini memiliki kewenangan legal dalam pengambilan keputusan. Mereka meliputi unsur eksekutif di berbagai tingkatan, legislatif, dan instansi yang berwenang.

Suryawati *et al.* (2023) menyatakan bahwa keterlibatan dan peran aktor merupakan elemen yang penting dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Menurut Amalyah *et al.* (2016), *stakeholder* adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan, berpartisipasi, atau terdampak (baik secara positif maupun negatif) oleh aktivitas atau program pembangunan. Menurut Nugroho dan Zauhar (2014) *stakeholder* dalam program pembangunan diklasifikasikan berdasarkan perannya antara lain sebagai berikut:

1. Pembuat Kebijakan (*policymakers*) adalah *stakeholder* yang berperan dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.
2. Koordinator adalah *stakeholder* yang berfungsi menghubungkan para pemangku kepentingan lainnya yang memiliki keterlibatan dalam suatu kebijakan.
3. Fasilitator adalah *stakeholder* yang berperan sebagai penyedia segala kebutuhan bagi individu atau kelompok.
4. Pelaksana adalah *stakeholder* yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang mencakup kelompok sasaran di dalamnya.
5. Akselerator adalah *stakeholder* yang berperan dalam mempercepat pelaksanaan program/kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Keterlibatan serta peran para aktor merupakan elemen penting dalam pengelolaan sumber daya alam (Hamilton dan Ruta, 2006), termasuk dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (Fauzi, 2019). Aktor didefinisikan sebagai lembaga, kelompok, atau individu yang memiliki peran utama dalam sistem, termasuk dalam mobilisasi sumber daya alam (Avelino dan Wittmayer, 2016; Rees dan Mac Donell, 2017). Mereka tidak hanya menentukan cara pencapaian tujuan

keberlanjutan pembangunan, tetapi juga menetapkan indikator yang menjadi dasar keberlanjutan. Hubungan dan interaksi antaraktor, daya saing di antara mereka, serta sikap terhadap indikator keberlanjutan sering kali disebut sebagai interaksi antaraktor.

Analisis aktor adalah suatu pendekatan terstruktur yang bertujuan untuk memahami dinamika hubungan antar aktor. Metode ini fokus pada identifikasi karakteristik setiap aktor, termasuk kekuatan dan kelemahan serta sikap mereka terhadap berbagai persoalan yang ada (Rees *et al.*, 2017). Proses analisisnya yaitu mengidentifikasi posisi masing-masing aktor terkait isu strategis. Selanjutnya, menganalisis tingkat konvergensi dan divergensi di antara para aktor. Tahap terakhir adalah melakukan antisipasi terkait kemungkinan terbentuknya koalisi atau potensi konflik. Michel Godet telah mengembangkan model multiaktor yang menjadi kerangka kerja komprehensif dalam mengkaji interaksi antaraktor. Model ini sangat diminati oleh para profesional analisis karena kemampuannya memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan strategis dalam suatu sistem (Fauzi, 2019).

Model multiaktor merupakan pendekatan yang membantu pengambil keputusan dalam memahami peran para aktor, terutama dalam memengaruhi faktor-faktor penting yang membentuk masa depan suatu sistem. Pendekatan ini bertujuan untuk mengenali strategi aktor serta mengevaluasi dampak tindakan aktor terhadap faktor-faktor kunci perkembangan sistem (Bryson *et al.*, 2017). Dalam pendekatan multiaktor, sistem dipahami sebagai interaksi antar aktor yang memiliki posisi dan kepentingan yang berbeda, serta memengaruhi hasil melalui preferensi pribadi yang dimilikinya (Beyers *et al.*, 2014). Aktor dalam model ini diartikan sebagai entitas yang memiliki peran dalam sistem yang diteliti, dengan kemampuan untuk menggerakkan sumber daya guna memengaruhi hasil. Baik secara langsung dan dampaknya terhadap aktor lain (Fauzi, 2019). Dengan memahami pola interaksi dan strategi para aktor, model ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk merencanakan dan mengantisipasi berbagai skenario, baik dalam kondisi saat ini maupun yang akan datang.

2.3 Usaha Penangkapan Rajungan Berkelanjutan

2.3.1 Rajungan

Rajungan disebut juga sebagai *Cancer pelagicus*: Linnaeus (1766), *Neptunus pelagicus*, *Lupea pelagica*: Zairion *et al.*, (2015). Rajungan termasuk salah satu jenis Filum Crustacea. Berikut ini adalah klasifikasi rajungan menurut Kangas (2000).

Filum	: Crustacea
Kelas	: Malacostraca
Sub kelas	: Eumalacostraca
Ordo	: Decapoda
Famili	: Portunidae
Genus	: Portunus
Spesies	: <i>Portunus pelagicus</i>
Nama lokal	: Rajungan
Nama Umum	: <i>Blue swimmer crab</i> , <i>blue manna crab</i> , atau <i>blue crab</i>

Secara morfologi, rajungan jantan dan betina memiliki warna yang berbeda yaitu karapas jantan berwarna biru terang, sedangkan karapas betina berwarna hijau atau coklat (Budiarto *et al.*, 2015). Bentuk karapas heksagonal, memiliki garis lintang oral dan heksagonal atau berbentuk bulat, permukaan dorsal cenderung datar sampai cembung halus, biasanya bergelombang atau berpasir, permukaan lebar, bagian pinggir kadang bergerigi, kadang 5 sampai 9 gigi di setiap anterolateral, bagian pinggir posterolateral kadang bersatu. Endopodite dari maxilipped kedua dengan cuping berkembang kuat di sisi dalam. Untuk menyesuaikan keadaan, lengan samping memipih, segmen terakhir kedua adalah bagian seperti sepasang kayuh (Radiopoetro, 1986). Bagian bawah tubuh merupakan abdomen dengan tutup abdomen rajungan jantan berbentuk segitiga memanjang dengan ruas-ruas yang menyempit, sedangkan pada rajungan betina mempunyai tutup abdomen berbentuk kubah dengan ruas yang melebar (Kanedi *et al.*, 2012).

Pola pertumbuhan rajungan bersifat allometrik negatif yaitu pertumbuhan lebar karapas rajungan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan beratnya (Pratiwi *et al.*, 2021). Lebih jelasnya, menurut Thariq *et al.* (2020) pola pertumbuhan rajungan betina bersifat allometrik negative sedangkan rajungan jantan bersifat allometrik positif. Berdasarkan tingkat pertumbuhan rajungan dapat dikelompokkan dalam tiga ukuran berdasarkan lebar karapas yaitu yaitu juwana dengan lebar ukuran karapas 20-80 mm, menjelang dewasa dengan lebar ukuran 70-150 mm dan rajungan dewasa dengan lebar karapas 150-200 mm.

Menurut Asphama *et al.* (2015) rajungan hidup di perairan pesisir dan landas kontinen, termasuk habitat dengan dasar berpasir, berlumpur, alga dan lamun, mulai dari zona pasang surut hingga kedalaman 50 meter. Dalam keadaan normal, rajungan hidup di kedalaman lebih dari 65 m di dasar laut, tetapi terkadang mereka juga berenang dekat permukaan laut. (Romimohtarto, 2001). Menurut Isnawati *et al.* (2023) rajungan hidup di daerah estuaria kemudian bermigrasi ke perairan yang salinitas lebih tinggi untuk menetas dan setelah mencapai rajungan muda akan kembali lagi ke daerah estuaria.

Rajungan muda banyak ditemukan pada perairan dangkal yang mendekati garis pantai, dan rajungan dewasa di temukan pada perairan dalam hingga kedalaman 50 meter dengan salinitas yang tinggi (Kusuma *et al.*, 2012). Prasetyo *et al.* (2014) mengungkapkan bahwa rajungan dengan berat dan ukuran lebih kecil ditemukan pada kedalaman kurang dari 5,5 meter dan didominasi oleh rajungan jantan. Sebaliknya rajungan dengan berat dan ukuran tubuh semakin besar ditemukan pada kedalaman 5,5 – 10 meter dan didominasi dengan rajungan betina. Pola migrasi dari siklus reproduksi rajungan betina dan kedalaman perairan berpengaruh terhadap perbedaan ukuran rajungan .

Menuru Ihsan *et al.* (2014) jumlah rekrutmen yang dihasilkan setiap individu rajungan mempengaruhi pola distribusi rajungan dan daerah penangkapan. Daerah penangkapan rajungan selalu berubah-ubah mengikuti kondisi habitat rajungan yang sesuai. Paramater oseanografi perairan seperti salinitas, suhu,

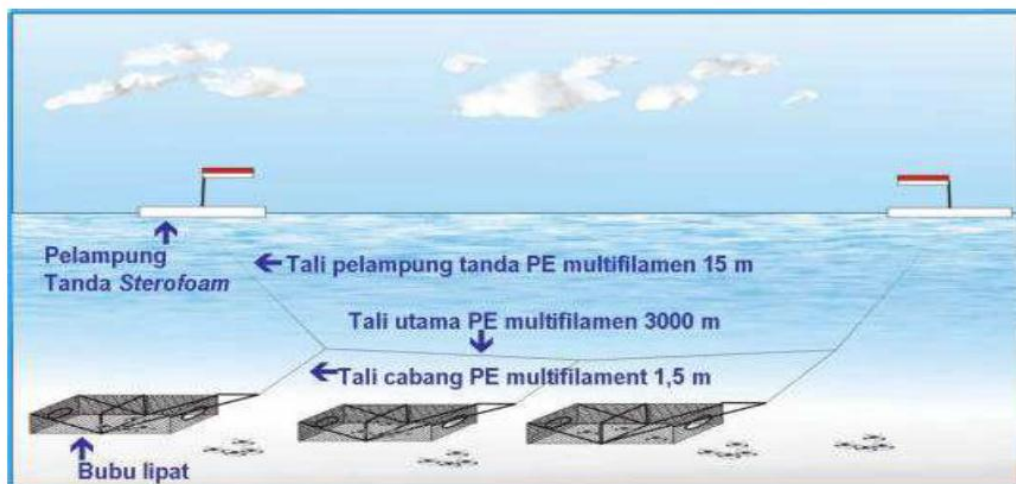
oksigen terlarut, kedalaman, pH dan lain-lain sangat mempengaruhi habitat rajungan (Zulkarnain *et al.*, 2006). Paramater oseanografi tersebut jelas mempengaruhi pola pergerakan dan dinamika air laut baik secara horizontal maupun vertikal yang pada akhirnya juga mempengaruhi distribusi dan kelimpahan rajungan.

2.3.2 Alat Tangkap Rajungan

A. Bubu Lipat

Bubu adalah alat tangkap ikan berbentuk perangkap. Konstruksi alat tangkap bubu memiliki pintu dan badan yang di rancang sedemikian rupa, sehingga jika ikan masuk ke dalam bubu melalui pintu maka tidak dapat keluar lagi. Bubu dapat dioperasionalkan di perairan pelagis atau demersal tergantung target ikan yang ditangkap (Dirjen Perikanan Tangkap KKP, 2003). Menurut Martasuganda (2003) bentuk dan ukuran bubu tidak memiliki keseragaman antar daerah, ada yang berbentuk segi empat, persegi panjang, silinder, trapesium dan lainnya. Bentuk bubu sangat dipengaruhi oleh pengetahuan nelayan yang mengoperasikannya. Bahan yang digunakan untuk alat tangkap bubu dapat berbeda-beda tergantung daerah di Indonesia. Ada bubu yang terbuat dari anyaman bambu, kawat, rotan, dan jaring (Gardenia, 2006).

Bubu lipat adalah alat tangkap yang beroperasi secara pasif di perairan pesisir pantai dan dimanfaatkan untuk menangkap rajungan. cara operasian bubu lipat ini mudah dan bersifat pasif, menggunakan umpan sebagai penarik rajungan agar masuk dalam bubu dan terperangkap. Saat terperangkap di dalam bubu, rajungan tetap hidup dan dapat bergerak di dalam bubu (Zulkarnaen *et al.*, 2019). Karena bersifat pasif dan selektif, alat tangkap bubu lipat termasuk ke dalam alat tangkap ramah lingkungan. Hasil tangkapan bubu dipengaruhi oleh dimensi ukuran bubu, bahan kontruksi bubu, jenis umpan, penggunaan umpan peletakan umpan, letak mulut bubu, jumlah mulut dan perendaman bubu (Martasuganda, 2003). Kontruksi bubu dapat dilihat pada Gambar 2.



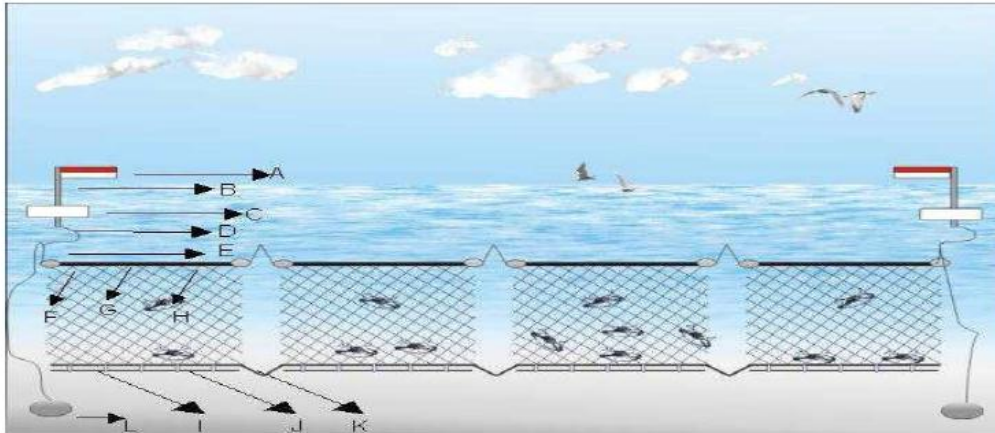
Gambar 2. Konstruksi rangkaian alat tangkap bubu lipat (Gardenia. 2006)

Pengoperasian bubu lipat biasanya menggunakan sistem tunggal atau sistem rawai, tergantung kedalaman daerah penangkapan, ruang yang dibutuhkan dan model pemasangan bubu lipat. Pada perairan dangkal dan karang bubu dipasang satu demi satu (pemasangan sistem tunggal) diantara karang karena adanya arus. Sedangkan untuk perairan dalam bubu dipasang secara rawai (pemasangan sistem berantai) (Sainsbury, 1996). Waktu pengoperasian bubu lipat (*setting*) dan pengangkatan bubu lipat (*hauling*) biasa dilakukan pada waktu pagi hari, siang hari, sore hari, sebelum matahari terbenam atau malam hari tergantung dari nelayan yang mengoperasikannya. Perendaman bubu dapat dilakukan selama beberapa jam saja hingga 7 hari 7 malam, tergantung dari hasil rajungan yang tertangkap (Martasuganda, 2003). Menurut Saraswati *et al.* (2021), dikarenakan bubu lipat adalah alat tangkap pasif, sehingga umpan (pemikat) dan lama perendaman (*immersing*) bubu lipat sangat berpengaruh terhadap jumlah hasil tangkapan rajungan.

B. Jaring Insang Rajungan

Menurut Martasuganda (2002), jaring insang (*gill nets*) yang ada di Indonesia terdiri dari jaring insang satu lembar atau *single gillnet*, jaring insang dua lembar atau *double gillnet* dan jaring insang tiga lembar atau *trammel net*. Usaha penangkapan rajungan dengan alat tangkap jarring biasa dilakukan oleh nelayan skala kecil dengan alat tangkap dominan yang digunakan adalah jaring insang

dasar (*set gillnet*) atau jaring kejer (Zairion *et al.*, 2014). Berdasarkan klasifikasi jaring kejer masuk kedalam kelompok jaring insang tetap. Jaring kejer yang digunakan nelayan untuk menangkap rajungan termasuk kedalam klasifikasi jaring puntal atau *tangle net*. Cara kerjanya yaitu rajungan tertangkap dengan cara terpuntal atau terbelit bagian tubuhnya pada badan jaring atau *entangled* (Ihsan *et al.*, 2014).



Keterangan :

A. bendera	B. bambu
C. styrofoam	D. tali pengikat
E. tali selempang	F. pelampung
G. tali pelampung	H. tali ris atas
I. pemberat	J. tali pemberat
K. tali ris bawah	L. pemberat tambahan

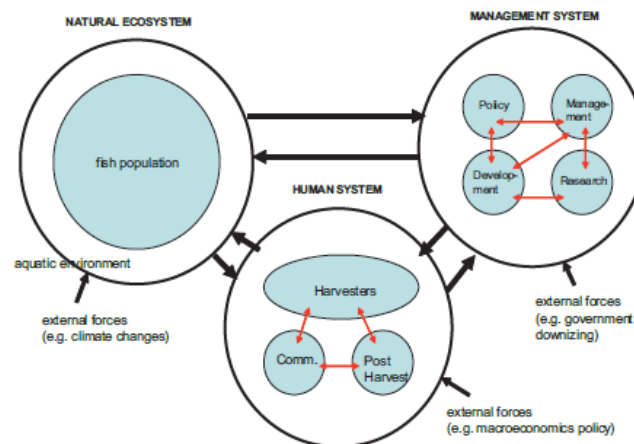
Gambar 3. Konstruksi rangkaian alat tangkap jaring kejer (Gardenia, 2006)

Pengoperasian jaring kejer dengan cara diletakkan di dasar perairan, dengan sasaran utamanya adalah rajungan dan ikan-ikan dasar. Jaring kejer dipasang melintang melawan arah arus dengan tujuan untuk menghadang dan diharapkan target tangkapan menabrak jaring serta tejerat dan terpuntal atau *entangled* pada tubuh jaring (Ihsan *et al.*, 2014). Warna jaring yang digunakan disesuaikan dengan warna perairan dimana jaring kejer dioperasikan. Warna jaring memiliki derajat visibilitas yang berbeda-beda bagi rajungan dan ikan. Sebaiknya warna jaring tidak kontras dengan warna air maupun warna dasar perairan. Ayodhya (1981) menyatakan bahwa warna jaring di dalam air akan dipengaruhi oleh faktor kedalaman, transparansi, sinar matahari, sinar bulan dan lain-lain.

2.3.3 Pengelolaan perikanan berkelanjutan

Seringkali terjadi kesalahpahaman di masyarakat yang melihat perikanan hanya sebagai sebuah komoditas ekonomi. Pandangan klasik yang menempatkan sektor seperti perikanan, pertanian, kehutanan, dan peternakan sebagai bagian dari sektor primer sering kali menyederhanakan kompleksitasnya. Namun, kenyataannya jauh lebih rumit. Penelitian menunjukkan bahwa perikanan sesungguhnya merupakan sistem kompleks yang memiliki keterkaitan erat antara berbagai elemen (*direct inter-linkages*), mencakup ekosistem, ekonomi, komunitas, dan lembaga terkait (Atmaja *et al.*, 2017). Keempat dimensi ini saling berinteraksi secara dinamis dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain ketika membahas isu perikanan dan kelautan. Dengan demikian, pengertian tentang perikanan tidak bisa hanya dibatasi pada pandangan sederhana sebagai sekadar penghasil komoditas, melainkan harus dilihat sebagai suatu sistem yang utuh dan saling terhubung.

Charles (2001) menekankan pentingnya memahami pendekatan sistem dalam pengelolaan sumber daya ikan. *By nature*, perikanan pada hakikatnya adalah sebuah sistem yang kompleks, di mana berbagai faktor dan fenomena saling terkait dan bergantung (*interdependencies*) satu sama lain secara mendalam.



Gambar 4. Perikanan sebagai sebuah sistem (Charles 2001)

Lebih lanjut, Charles (2001) menjabarkan bahwa sistem perikanan terdiri dari tiga komponen utama yang saling berinteraksi yaitu: (1) sistem alam (*natural system*) yang mencakup ekosistem, ikan dan lingkungan biofisik; (2) sistem manusia (*human system*) yang terdiri dari unsur nelayan atau petani ikan, pelaku pasar dan

konsumen, rumah tangga perikanan dan komunitas pesisir serta lingkungan sosial, ekonomi dan budaya yang terkait dengan sistem ini; (3) sistem pengelolaan perikanan (*fishery management system*) yang mencakup unsur-unsur kebijakan dan perencanaan perikanan, pembangunan perikanan, rejim pengelolaan perikanan, dan riset perikanan.

Pengelolaan perikanan dicirikan oleh tujuan yang banyak dan saling bertentangan, beragam pengambil kebijakan dengan kepentingan yang berbeda dan tingginya tingkat ketidakpastian mengenai dinamika sumberdaya yang sedang dikelola (Smith *et al.*, 1999). Keberlanjutan (*sustainability*) wilayah pesisir dan laut harus terus menjadi prioritas, karena dilihat dari fungsi dan domain ruang wilayah ini sangat besar bagi ketersediaan sumberdaya dan penghidupan masyarakat yang tinggal di sekelilingnya (Hasani *et al.*, 2024). Dahuri *et al.* (1996) menyatakan bahwa pembangunan wilayah pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan hanya dapat dicapai jika pengelolaannya dilakukan secara terpadu (*integrated*), dengan mempertimbangkan empat dimensi utama: ekologi, sosial ekonomi dan budaya, sosial politik, serta aspek hukum dan kelembagaan.

Konsep pembangunan berkelanjutan pada sektor perikanan (*sustainable fisheries*) merupakan konsep pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab yang dapat menjamin keberlanjutan perikanan dengan keseimbangan antara tingkat eksploitasi dengan sumberdaya ikan (Hasani, 2012). Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai keberlangsungan produktivitas sumberdaya perairan (Nugroho, 2021).

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah upaya pembangunan yang memastikan kebutuhan manusia saat ini terpenuhi tanpa

mengorbankan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987, sebuah komisi independen yang dibentuk untuk membahas dan memberikan rekomendasi terkait isu-isu lingkungan global setelah Konferensi Stockholm 1972. WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengurangi peluang generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Bockisch, 2012).

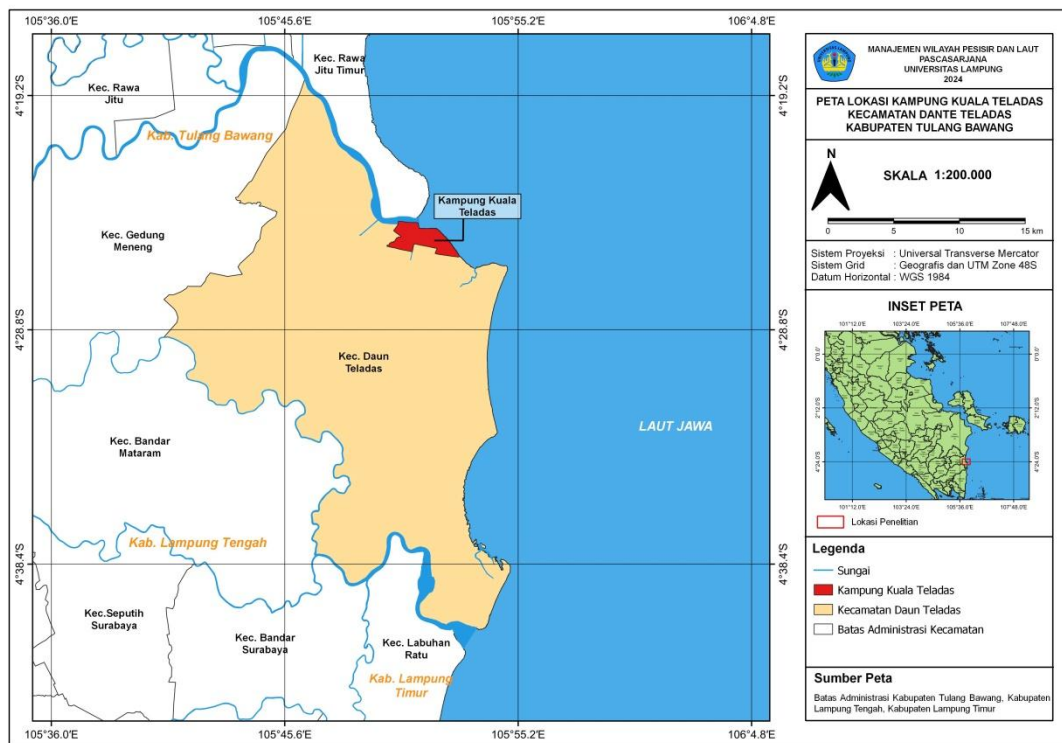
Keberlanjutan dalam pembangunan adalah keterpaduan pertimbangan lingkungan dan ekonomi sebagai strategi utama pembangunan berkelanjutan. Menurut Charles (2001) konsep keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan terdiri dari 4 (empat) yaitu:

1. Keberlanjutan ekologi yang fokus pada upaya menjaga keseimbangan stok ikan. Hal ini dilakukan dengan memastikan eksploitasi tidak melampaui daya dukung ekosistem, serta berupaya secara berkelanjutan meningkatkan kualitas dan kapasitas lingkungan perairan.
2. Keberlanjutan komunitas yang menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Pendekatan ini melihat pembangunan perikanan tidak sekadar dari perspektif individu, melainkan dampaknya terhadap keseluruhan komunitas pesisir atau nelayan.
3. Keberlanjutan sosial dan ekonomi yang menekankan kesejahteraan para pelaku perikanan pada level individual. Tujuannya adalah mempertahankan atau bahkan meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga aktivitas perikanan tidak sekadar menghasilkan produk, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi para pelakunya.
4. Keberlanjutan kelembagaan, yang berkaitan dengan aspek administratif dan finansial. Dimensi ini menekankan pentingnya tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel sebagai prasyarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan perikanan yang berkelanjutan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli – September 2024 di Kampung Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang (Gambar 5).



Gambar 5. Lokasi penelitian Kampung Kuala Teladas

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dikelompokkan menjadi dua yaitu alat untuk pengambilan data dan untuk pengolahan data. Alat pengambilan data terdiri dari panduan pertanyaan, kamera, dan alat tulis. Kemudian untuk alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laptop serta perangkat lunak berupa

Microsoft Word, Microsoft Excel, *Software Mactor (Matrix of Alliances and Conflicts Tactics, Objectives and Recommendations)*.

Apilasi perangkat lunak Mactor, dirancang untuk meningkatkan analisis struktural prospektif, seperti AHP (Proses Hirarki Analitik) dan ISM (Interpretasi Pemodelan Struktural) dengan fokus pada peran para aktor atau *stakeholder*. Metode MACTOR dikembangkan oleh *Institute d'Innovation Informatique pour l'Etreprise* pada tahun 1986, di bawah pengawasan Laboratorium Investigasi Laboratorium Investigasi Prospektif dan Strategi (LIPSOR) (Godet dan Roubelat, 1996).

3.3 Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Robert K. Yin (2019) menyatakan bahwa pendekatan studi kasus dipilih karena dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai fenomena yang kompleks dalam konteks nyata. Pendekatan ini sangat relevan untuk menganalisis kelembagaan dan *stakeholder* pada usaha penangkapan rajungan berkelanjutan di Kuala Teladas, Tulang Bawang. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif yang bersifat eksploratif dan deskriptif. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi dan menggambarkan secara komprehensif struktur kelembagaan, peran *stakeholder*, serta dinamika yang terjadi di lokasi penelitian.

3.4 Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*in depth interview*), pengamatan terlibat (*observasi partisipasi*), diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), dan studi dokumentasi.

A. Wawancara Mendalam (*in depth interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan bersama instrumen lain, namun sebagai metode, wawancara berfokus sepenuhnya pada informan atau responden (Irawan, 2006). Penelitian ini menggunakan

wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pendekatan tidak terstruktur, di mana daftar pertanyaan yang telah disusun disesuaikan dengan situasi dan karakteristik unik setiap informan. Wawancara berlangsung secara alami, menyerupai percakapan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran, pengaruh, dan kepentingan para pemangku kepentingan, serta aktivitas kelembagaan dalam usaha penangkapan rajungan. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan kunci yang dipilih dengan purposive sampling, berdasarkan pemahaman dan keterlibatan mereka terkait usaha penangkapan rajungan di Kampung Kuala Teladas. Daftar informan yang terlibat dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah informan penelitian

No.	Informan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Nelayan	3	Nelayan rajungan
2	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	2	Ketua atau pengurus KUB
3	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	1	Ketua atau pengurus Pokmaswas
4	Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar)	2	Pengolah rajungan
5	Pemerintah Kampung	1	Pemerintahan desa
6	Penyuluh Perikanan	1	Pendamping nelayan
7	Pembina/Pengusaha Rajungan Tulang Bawang	2	Pengusaha rajungan
8	Lembaga Swadaya Masyarakat	1	Mitra Bentala
9	Dinas Perikanan Tulang Bawang	1	Kepala dinas atau staff
10	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	1	Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)
11	Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB)	1	Ketua atau anggota tim
Jumlah		16	

B. Pengamatan Terlibat (*observasi partisipasi*)

Pengamatan terlibat dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap topik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang disusun dalam kalimat ilmiah sesuai dengan kebutuhan penelitian (Irawan, 2006). Teknik ini bertujuan

untuk memahami lebih dekat dan mendalam tentang permasalahan yang sedang diamati sekaligus memverifikasi data hasil wawancara mendalam sehingga dapat mengungkap dan mendeskripsikan secara utuh dan sistematis tentang usaha penangkapan rajungan di Kuala Teladas.

C. Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*)

Diskusi kelompok terfokus/*Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan untuk mendalami permasalahan penelitian. FGD bertujuan untuk menentukan aktor pemangku kepentingan yang terlibat dan tujuan strategis yang dicapai pada usaha penangkapan rajungan berkelanjutan di Kuala Teladas. Hasil FGD digunakan sebagai bahan analisis dengan pendekatan faktor dan aktor (*stakeholder*) dengan menggunakan alat analisis Mactor (Wardono *et al.*, 2019). Hasil analisis Mactor, selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk memformulasikan rencana kebijakan yang akan diusulkan (Fauzi, 2019). Untuk mendorong keterlibatan dan pengayaan informasi dari peserta pada saat FGD, maka FGD dipandu oleh moderator. Peserta adalah para aktor yang terlibat dalam usaha penangkapan rajungan di Kuala Teladas.

D. Studi Dokumentasi

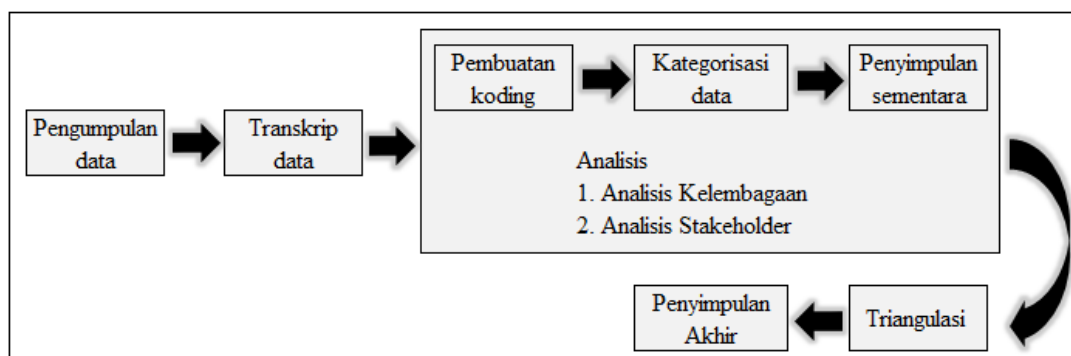
Studi dokumentasi adalah pengumpulan informasi dengan memanfaatkan berbagai dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh organisasi atau lembaga yang menjadi fokus penelitian. Dokumen ini dapat berupa prosedur kerja, peraturan resmi, dokumentasi visual, laporan kegiatan, foto, serta arsip elektronik (Irawan, 2006). Dokumentasi yang baik tidak hanya bermanfaat untuk penelitian ini, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki topik atau konteks serupa.

3.5 Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, menurut Bogdan dan Biklen (1982), analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara (*interview*), catatan di lapangan dan bahan-bahan yang

didapatkan, yang kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap suatu fenomena dan membantu untuk mempresentasikan hasil penelitian kepada orang lain. Tersirat dalam penjelasan di atas bahwa analisis data kualitatif terkait erat dengan dengan pengumpulan data dan interpretasi data (Irawan, 2006). Oleh karena itu seluruh data hasil wawancara dari informan kunci dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif untuk membantu dalam penarikan kesimpulan penelitian.

Menurut Irawan (2006) pengelolaan data kualitatif memerlukan sistem pengkodean (*coding*), sistem mekanisasi penyimpanan (*storage*) dan pengaksesan (*access*) data yang mudah digunakan. Koding sistem berisi daftar kode dengan deskripsi singkat yang digunakan sebagai label untuk memilah data-data sesuai karakteristiknya. Sedangkan sistem mekanisasi penyimpanan dan pengaksesan data adalah sistem yang terdiri sarana perangkat fisik dan lunak untuk keperluan penyimpanan, pengolahan dan pengaksesan data. Proses analisis data pada penelitian ini dilakukan seperti pada Gambar 6.



Gambar 6. Proses analisa data kualitatif (Irawan, 2006)

Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Pengumpulan data
Mewawancarai informan kunci, melakukan observasi, dan studi dokumentasi
- Transkrip data
Mengubah hasil wawancara ke dalam bentuk tertulis
- Pembuatan koding
Menemukan kata kunci dari transkrip data serta memberikan label kode pada setiap kata kunci

- Katagorisasi data
Merangkum kata-kata kunci menurut kategorinya masing-masing, sehingga data akan lebih mengerucut pada beberapa tema/kategori
- Penyimpulan sementara
Kesimpulan ini berdasarkan data yang diperoleh dan bukan merupakan penafsiran peneliti
- Triangulasi
Proses verifikasi informasi dari sumber data/informan yang satu dengan sumber data yang lain
- Kesimpulan akhir
Kesimpulan dapat berupa konseptual ataupun dengan cara mengambil intisari yang dikonversikan menjadi pernyataan dekontekstualisasi.

Data yang dianalisis secara kualitatif kemudian digunakan dalam analisis lanjutan sesuai kebutuhan tujuan penelitian. Analisis data lanjutan penelitian ini menggunakan analisis kelembagaan dan analisis *stakeholders*. Prosedur pembuatan koding, kategori data, dan penyimpulan sementara dalam analisis kualitatif merupakan bagian dari analisis data lanjutan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan untuk data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan terlibat (*participant observation*) dan diskusi kelompok terfokus (FGD) akan dilakukan pencatatan dengan dengan format yang terdapat dalam lampiran. Data observasi ini menjadi data pendukung yang juga akan sangat membantu pengambilan kesimpulan dalam analisis kualitatif.

3.4.1 Analisis kelembagaan

Analisis kelembagaan menggunakan konsep Uphoff (1986) yang mendefinisikan kelembagaan sebagai seperangkat norma dan perilaku yang bertahan sepanjang waktu dengan melayani tujuan yang dihargai secara kolektif. Penelitian berfokus pada aturan (norma) dan perilaku nelayan di Kuala Teladas. Aturan formal yang telah di tetapkan dan aturan informal dalam kelembagaan lokal yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUB) akan ditelaah untuk memahami kerangka aturan (norma) yang membentuk perilaku dalam interaksi sosial. Penelitian juga akan

menganalisis efektivitas mekanisme sanksi, baik formal maupun informal yang ada dalam kelembagaan lokal dalam mendukung keberlanjutan. Dengan menganalisis interaksi antara aturan (norma), perilaku, dan sanksi dalam konteks kelembagaan untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang potensi dan tantangan kelembagaan lokal dalam mendukung usaha penangkapan rajungan berkelanjutan.

3.4.2 Analisis Stakeholder

Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis dengan perangkat lunak Mactor. Aplikasi Mactor merupakan alat analisis strategis yang dikembangkan oleh Michel Godet pada tahun 1991. Analisis Mactor fokus pada tiga dimensi pengaruh antaraktor yaitu pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh potensial. Pengaruh langsung terjadi ketika satu aktor secara langsung memengaruhi aktor lain. Pengaruh tidak langsung tergambar melalui hubungan berantai antaraktor, di mana satu aktor memengaruhi aktor lain melalui perantara. Sementara pengaruh potensial merujuk pada kemungkinan atau kapasitas suatu aktor untuk memengaruhi aktor lain di masa depan. Mactor bersandar pada pendekatan analisis struktural, memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas interaksi dan kepentingan antaraktor dalam konteks yang spesifik untuk memahami dinamika hubungan kekuasaan, daya saing, dan sikap para aktor terhadap tujuan (Fauzi, 2019).

Tahapan analisisnya yaitu:

1. Identifikasi *stakeholder*
Mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat yang mencakup semua pihak yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap usaha penangkapan rajungan.
2. Identifikasi kebijakan (*objective*)
Mengidentifikasi kebijakan strategis terkait dengan usaha penangkapan rajungan.
3. Pengumpulan data
Data dikumpulkan dengan melakukan FGD dan wawancara, untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pandangan dan tujuan

masing-masing aktor. Pengumpulan data dibantu dengan kuesioner untuk mendapatkan data mengenai pengaruh dan sikap aktor terhadap tujuan strategis yang akan ditetapkan.

4. Penilaian pengaruh antar aktor

Penilaian pengaruh langsung antar aktor menggunakan matriks pengaruh langsung diukur dengan skala

- 0 = tidak berhubungan/berpengaruh
- 1 = berpengaruh lemah (mempengaruhi prosedur operasional aktor)
- 2 = berpengaruh moderat (mempengaruhi pekerjaan aktor)
- 3 = berhubungan dan berpengaruh kuat (mempengaruhi misi aktor)
- 4 = Variabel vertikal berhubungan dan berpengaruh sangat kuat (mempengaruhi eksistensi aktor)

Hasil penilaian akan mengkualifikasi intensitas pengaruh antar aktor (*inter-actor influence*) menjadi kelompok pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh potensial. Pengaruh langsung terjadi jika aktor A memiliki efek pada aktor B, sedangkan pengaruh tidak langsung terjadi jika aktor A mempengaruhi aktor B dan B mempengaruhi aktor C, dan dengan proses transitivitas, aktor C secara tidak langsung dipengaruhi oleh A. Pengaruh potensial terjadi jika pengaruh seharusnya dimiliki aktor A terhadap B. (Godet *et al.*, 1999)

5. Penilaian posisi aktor terhadap kebijakan

Mengevaluasi posisi setiap aktor terhadap tujuan strategis menggunakan Matriks Posisi Aktor-Tujuan yang menjelaskan sikap aktor dan tingkat resistensi terhadap tujuan. Menurut Rees & MacDonell (2017) matriks posisi aktor-tujuan dinilai dengan skala (+) mendukung, (-) menentang dan (0) netral. Sedangkan nilai tujuan bagi aktor yang diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 0 = obyektif tidak memiliki potensi hasil yang baik
- 1 = obyektif tujuan sangat penting untuk kegiatan operasional aktor
- 2 = objektif tujuan amat vital bagi aktor
- 1 = obyektif tujuan tidak penting untuk kegiatan operasional aktor
- 2 = objektif tujuan tidak amat vital bagi aktor

- | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3 = obyektif tujuan sangat diperlukan untuk misi aktor | - 3 = obyektif tujuan tidak diperlukan untuk misi aktor |
| 4 = sangat diperlukan untuk kepentingan semua aktor | - 4 = tidak diperlukan untuk kepentingan semua aktor |

6. Pengisian matrik Mactor

Setelah data terkumpul, maka data di input dalam matriks pengaruh langsung (1MDI) dan matriks posisi aktor-tujuan (2MAO). Pengisian matriks dilakukan dengan mengambil nilai modus dari jawaban yang diberikan oleh para peserta selama FGD dan wawancara.

7. Analisis data dengan Mactor

Data dianalisis dengan Mactor untuk mengetahui :

- Pengaruh langsung dan tidak langsung antar aktor (MDII)
- Pengaruh aktor terhadap tujuan/kebijakan (3MAO)
- Konvergensi antar aktor (3CAA)
- Divergensi anytar aktor (3DAA)
- Ambivalensi aktor (3MAA)
- Jarak antar kebijakan

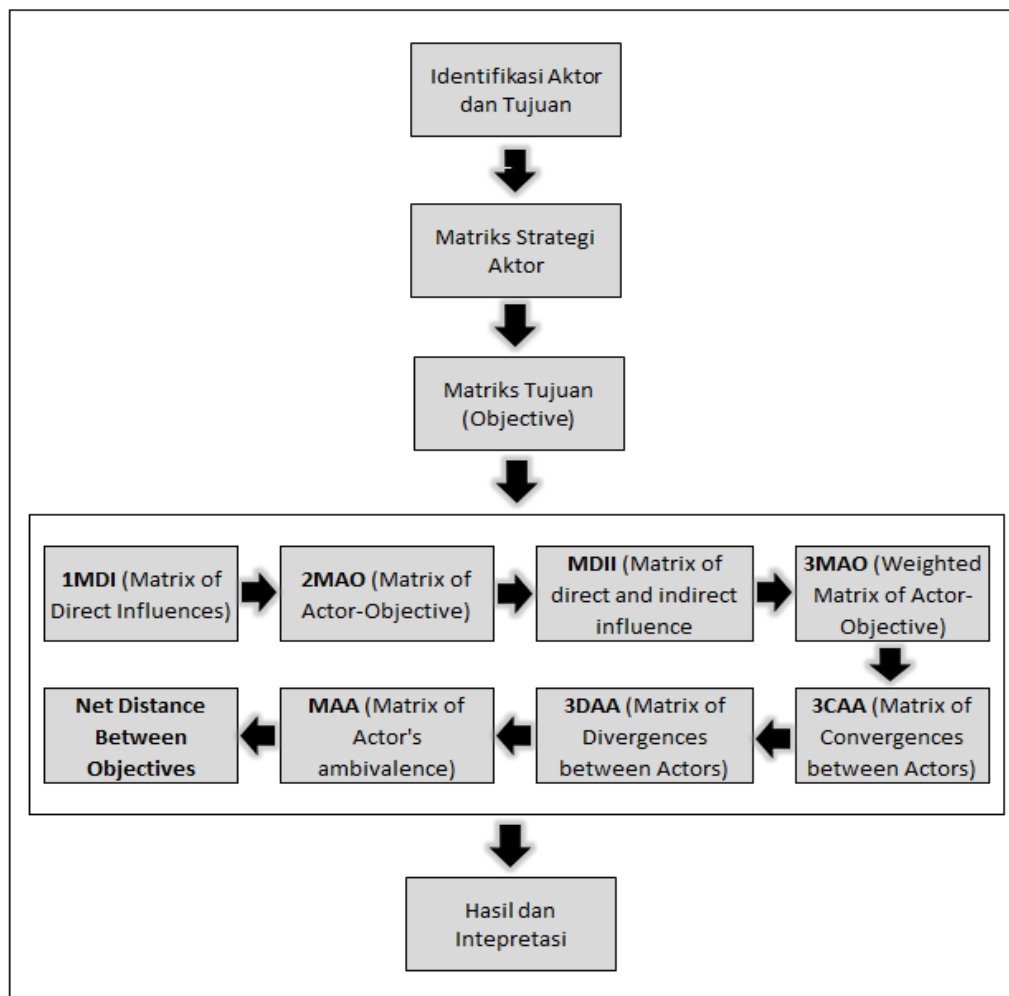
8. Mengintepretasikan hasil analisis Mactor.

Hasil analisis direpresantasikan secara visual melau format tabel dan grafik yang menjelaskan

- kekuatan dan kemampuan kompetitif setiap aktor yang terlibat,
- pola hubungan antar aktor, mencakup kemungkinan terbentuknya aliansi strategis dan potensi konflik yang mungkin terjadi,
- tingkat dukungan masing-masing aktor terhadap tujuan utama dari kegiatan penangkapan rajungan yang berkelanjutan..

9. Formula rekomendasi strategis

Penjelasan yang diberikan oleh analisis Mactor akan menciptakan hubungan kekuatan dan kemampuan antar aktor, daya saing aktor, dan sikap aktor terhadap tujuan. Operasi metode Mactor dimulai dari identifikasi stakeholder dan tujuan yang kemudian data-data tersebut dianalisis berdasarkan indikator yang hendak dihasilkan (Gambar 7).



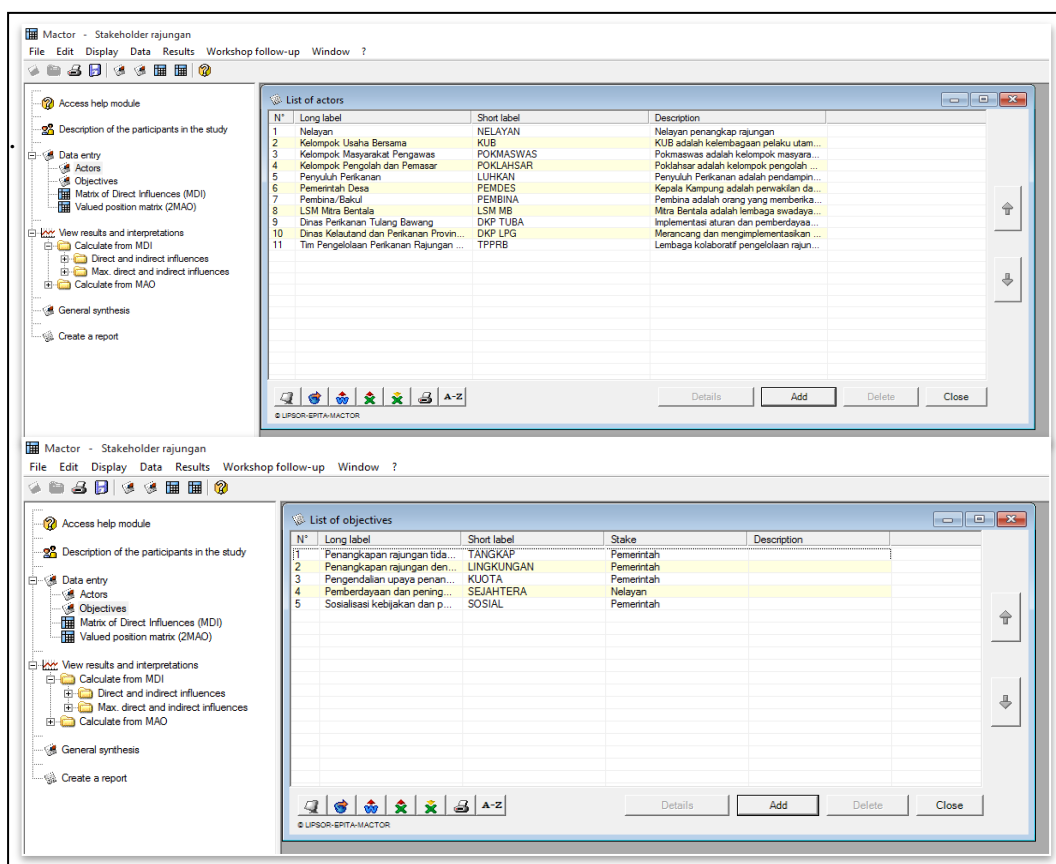
Gambar 7. Proses analisis Mactor (*Matrix of Alliances and Conflicts Tactics, Objectives and Recommendations*)

Fauzi (2019) menekankan pentingnya pemilihan indikator yang tepat untuk setiap dimensi keberlanjutan. Dalam penelitian ini akan menggunakan matriks:

6. 1MDI (*Matrix of Direct Influences*): untuk menilai hubungan kekuasaan dan pengaruh langsung antar stakeholder dalam usaha penangkapan rajungan
7. 2MAO (*Matrix of Actor-Objective*): untuk mengevaluasi sikap stakeholder terhadap tujuan-tujuan usaha penangkapan rajungan berkelanjutan.
8. MDII (*Matrix of direct and indirect influence*): merupakan indikator untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung yang dimiliki oleh para aktor terhadap aktor lainnya.
9. 3MAO (*Weighted Matrix of Actor-Objective*): memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kemampuan para aktor untuk mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan pengelolaan rajungan, dengan mempertimbangkan kekuatan pengaruh mereka.

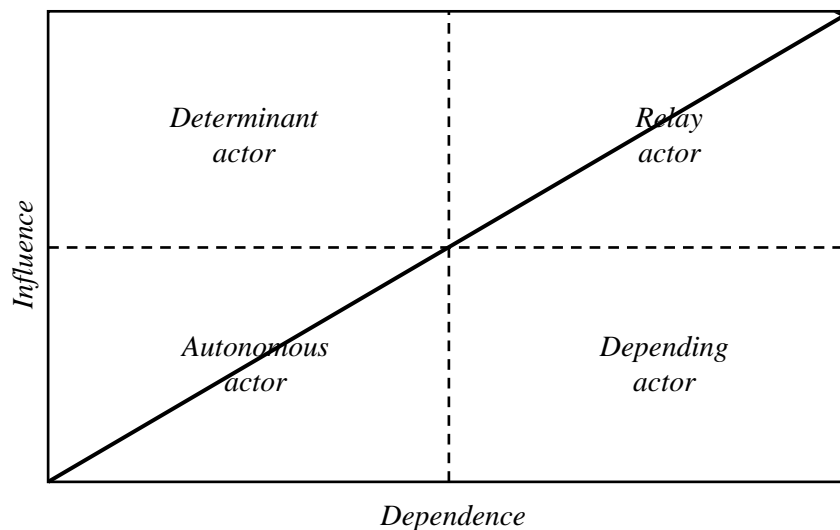
10. 3CAA (*Matrix of Convergences between Actors*): membantu mengidentifikasi potensi aliansi antara *stakeholder* yang memiliki kepentingan sejalan dalam kebijakan pengelolaan rajungan.
11. 3DAA (*Matrix of Divergences between Actors*): membantu untuk mengidentifikasi potensi konflik antara *stakeholder* dengan kepentingan yang bertentangan dalam kebijakan pengelolaan rajungan.
12. MAA (*Matrix of Actor's Ambivalence*): menunjukkan sikap atau posisi yang tidak konsisten dari aktor terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan pengelolaan rajungan.
13. *Net Distance Between Objective* : menunjukkan ukuran jarak yang digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh atau dekat tujuan-tujuan dalam suatu kebijakan berdasarkan perspektif berbagai aktor yang terlibat.

Bentuk input aktor dan tujuan sebagai variabel yang diteliti pada aplikasi Mactor seperti pada Gambar 8.



Gambar 8. Input para aktor dan tujuan pada perangkat lunak Mactor

Analisis peta kuadran digunakan untuk mengevaluasi pengaruh dan ketergantungan antar aktor, serta mengelompokkan ke dalam empat kuadran aktor, yaitu aktor penentu, aktor *relay*, aktor terpengaruh, dan aktor otonom, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 9 berikut:



Gambar 9. Peta kuadran pengaruh dan ketergantungan aktor

Menurut Fauzi (2019) dalam bukunya tentang analisis keberlanjutan menjelaskan bahwa aktor penentu adalah aktor yang sangat berpengaruh dan sedikit tergantung pada aktor lain. Aktor ini dianggap sebagai input dan sangat menentukan mobilitas sistem. Aktor penentu adalah aktor yang sangat penting dan memerlukan perhatian maksimum dari pembuat kebijakan karena sangat mempengaruhi aktor lain. Aktor *relay* (variabel staf) juga disebut sebagai aktor kunci. Aktor *relay* sangat berpengaruh dan pada saat yang sama sangat tergantung pada aktor lain. Aktor ini yang paling tidak stabil karena setiap pengaruh yang terjadi pada mereka dapat mengalir ke seluruh sistem. Aktor *relay* juga disebut sebagai faktor ketidakstabilan karena memiliki efek "*boomerang*" pada sistem, artinya tindakan pada aktor ini akan mempengaruhi arah mobilitas sistem.

Aktor otonom adalah aktor yang memiliki pengaruh kecil dan sedikit tergantung pada aktor lain. Aktor ini memiliki potensi rendah untuk menghasilkan perubahan (*inertia tren*) dalam sistem. Aktor otonom juga dikenal sebagai aktor yang

dikecualikan. Aktor otonom dibagi menjadi aktor terputus dan aktor tuas sekunder. Aktor terputus dan evolusinya dekat dengan asal, sehingga dapat dikecualikan dari dinamika sistem. Sedangkan aktor tuas sekunder berada di atas garis diagonal, dengan tindakan tertentu aktor ini dapat memperkuat sistem. Aktor output atau juga disebut *actor dependen*. Aktor output menggambarkan dampak yang dihasilkan dari aktor lain, terutama aktor penentu dan aktor *relay*. Aktor ini berada di kuadran tenggara peta. Lokasi aktor output menunjukkan variabel yang memiliki sedikit pengaruh dengan ketergantungan yang tinggi sehingga aktor sangat sensitif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kelembagaan KUB berperan penting dalam usaha penangkapan rajungan berkelanjutan. KUB berfungsi sebagai wadah kolektif bagi nelayan untuk berdiskusi dan berbagi informasi, serta membantu mereka dalam mengakses sumber daya, teknologi, dan pasar secara lebih efektif. Aturan main berupa hak, kewajiban dan sanksi telah di atur dalam AD/ART KUB. Implementasi kebijakan pengelolaan rajungan telah mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, meskipun masih menghadapi tantangan seperti tekanan ekonomi dan lemahnya pengawasan. Peningkatan kapasitas KUB melalui kolaborasi dengan berbagai pihak melalui pelatihan dan bantuan, telah memperkuat posisi ekonomi nelayan.
2. Terdapat 11 aktor kunci dan 5 tujuan (*objective*) dalam usaha penangkapan rajungan berkelanjutan di Kuala Teladas. Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (TPPRB) dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (DKP LPG) merupakan aktor dengan pengaruh terkuat. Nelayan menunjukkan tingkat divergensi dan ambivalensi tertinggi, yang mengindikasikan adanya potensi konflik kepentingan yang signifikan dengan *stakeholder* lainnya. Kebijakan penangkapan rajungan sesuai kriteria ukuran, peningkatan kesejahteraan nelayan, serta sosialisasi dan pengawasan memiliki tingkat mobilisasi tertinggi dan cenderung saling mendukung. Namun, kebijakan pengendalian upaya penangkapan berbasis kuota mendapat penentangan signifikan dari nelayan, pembina/pengusaha rajungan, dan Kelompok Usaha Bersama (KUB).
3. Strategi pengelolaan penangkapan rajungan berkelanjutan di Kampung Kuala Teladas menempatkan tiga aktor sentral sebagai pilar utama, yaitu pemerintah

desa, penyuluh perikanan, dan LSM Mitra Bentala. Pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi dialog lokal dan mendukung kebijakan berbasis komunitas melalui regulasi tingkat desa. Penyuluh perikanan bertanggung jawab memberikan edukasi dan pendampingan teknis kepada nelayan, terutama dalam adaptasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. LSM Mitra Bentala berfungsi sebagai mediator independen yang menjembatani kepentingan nelayan dan regulator, sekaligus mempromosikan advokasi kebijakan keberlanjutan. Kolaborasi ketiga aktor ini memastikan implementasi strategi pengelolaan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yaitu:

1. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan KUB melalui kolaborasi dengan *stakeholder* terkait melalui sosialisasi, pelatihan, dan kemitraan. Hal ini bermanfaat untuk mendukung keberlanjutan sosial-ekonomi nelayan dalam usaha penangkapan rajungan berkelanjutan.
2. Peningkatan kolaborasi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan yang dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan pemerintah daerah serta *stakeholder* yang langsung berinteraksi dalam usaha penangkapan rajungan, dimulai dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan sosialisasi peraturan pemerintah.
3. Pemerintah desa perlu mengembangkan regulasi berbasis komunitas seperti Peraturan Desa (Perdes) untuk mendukung usaha penangkapan rajungan yang berkelanjutan.
4. Peningkatan kapasitas penyuluh melalui penambahan jumlah penyuluh perikanan untuk meningkatkan intensitas pendampingan di lapangan dan meningkatkan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) agar dapat menjangkau lebih banyak kelompok nelayan.
5. Meningkatkan keterlibatan nelayan dalam proses pengambilan keputusan melalui forum diskusi reguler dan konsultasi publik dan memperkuat peran LSM Mitra Bentala, penyuluh perikanan, Pokmaswas, dan Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang sebagai mediator.

6. Berikan pelatihan keterampilan dan modal usaha untuk mengembangkan usaha alternatif untuk kelompok nelayan di musim paceklik.

Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya rajungan dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Hal ini juga akan meningkatkan dukungan dan partisipasi semua *stakeholder* dalam usaha penangkapan rajungan berkelanjutan di Kuala Teladas. Pendekatan kolaboratif dan adaptif ini tidak hanya akan membantu menyelesaikan konflik kepentingan yang ada, tetapi juga memastikan keberlanjutan jangka panjang dari usaha penangkapan rajungan. Dengan demikian, usaha penangkapan rajungan berkelanjutan dapat menjadi model pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Bambang, A.N., Wijayanto, D. 2014. Manajemen kolaboratif untuk introduksi pengelolaan rajungan yang berkelanjutan di Desa Betahwalang, Demak. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management & Technology*. 3(4): 29-36.
- Adhitama I, Amanwinata R, Affandi H. 2017. Implementasi kebijakan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*. 08(02): 7-18. ISSN:2087-1511.
- Amalyah, R., Hamid, D., Hakim, L. 2016. Peran stakeholder pariwisata dalam pengembangan Pulau Samalona sebagai destinasi wisata bahari. *Jurnal Administrasi Bisnis*. 37(1): 159-163
- Ariyani, N., Fauzi, A., Umar, F. 2020. Model hubungan aktor pemangku kepentingan dalam pengembangan potensi pariwisata Kedung Ombo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(2), 357-378.
- Asphama, A.I., Amir, F., Malina, A.C., Fujaya, Y. 2015. Habitat preferences of blue swimming crab (*Portunus pelagicus*). *An International Journal of Indonesian Aquaculture Society*. 16 (1): 10-15.
- Atmaja, S. B., Nugroho, D. 2017. Upaya-upaya pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 3(2): 101-113. doi: 10.15578/jkpi.3.2.2011.101-113
- Avelino, F., Wittmayer, J. M. 2016. Shifting power relations in sustainability transitions: A multi-actor perspective. *Journal of Environmental Policy and Planning*, 18(5), 628–649. doi: 10.1080/1523908X.2015.1112259
- Ayodhya, A. U. 1981. Metode Penangkapan Ikan (*Fishing Methods*). Yayasan Dewi Sri. CV Gaya Teknik, Bogor.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Tulang Bawang. 2023. Produksi dan nilai produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Tulang Bawang. <https://tulangbawangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTg0IzI=/produksi-dan-nilai-produksi-perikanan-tangkap-di-laut-.html>. Diakses 14 Maret 2024.

- Beyers, J., Dür, A., Marshall, D., Wonka, A. 2014. Policy-centred sampling in interest group research: Lessons from the INTEREURO project. *Interest Groups and Advocacy*, 3(2), 160–173. doi: 10.1057/iga.2014.10.
- Bryson, J., Sancino, A., Benington, J., Sørensen, E. 2017. Towards a multi-actor theory of public value co-creation. *Public Management Review*, 19(5), 640–654. doi: 10.1080/14719037.2016.1192164.
- Budiarto, A., Adrianto, L., Kamal, M. 2015. Status pengelolaan perikanan rajungan (*Portunus pelagicus*) dengan pendekatan ekosistem di Laut Jawa (WPPNRI 712). *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*. 7(1): 9-24.
- Cendrakasih, Y. U., Yudha, I. G., Febryano, I. G., Rochana, E., Supono, S., Nugroho, T., Karim, M. 2023. Margin dan Pangsa Pasar Rajungan *Portunus pelagicus* (Linnaeus, 1978) di Wilayah Pesisir Timur Lampung. *Journal of Tropical Marine Science*. 6(1), 1-10.
- Charles, A. T., 2001. Sustainable Fishery System. *Willey-Blackwell Science*. Oxford.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., Sitepu, M. J., 1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. *Pradnya Paramita*. Jakarta.
- Fauzi, A. 2019. Teknik analisis keberlanjutan. *Gramedia Pustaka Utama*. Jakarta
- Fauzi, A., Rostyaningsih, D. 2018. Analisis peran aktor dalam formulasi kebijakan Semarang smart city. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), 356-374.
- Febryano, I.G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., Hidayat, A. 2014. The roles and sustainability of local institutions of mangrove management in Pahawang Island. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 20(2): 69-76. doi: 10.7226/jtjfm.20.2.69
- Febryano, I.G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., Hidayat, A. 2015. Aktor dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan mangrove. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 12(2): 125-142. doi: 10.20886/jakk.2015.12.2.125-142
- Gardenia, T. 2006. Teknologi Penangkapan Pilihan Untuk Perikanan Rajungan (*Portunus pelagicus*) di Perairan Gebang Mekar Kabupaten Cirebon (Tesis). *Institut Pertanian Bogor*. Bogor. 120 hal
- Godet, M. 1994. From anticipation to action: A handbook of strategic prospective. *UNESCO*. Paris. 83-103 pp
- Godet, M., Roubelat F. 1996. Creating the future: The use and misuse of scenarios. *Long Range Planning*. 29(2):164–171. doi:10.1016/0024-6301(96)00004-0.

- Godet, M, Arcade, J., Meunier M., Roubelat F. 1999. Structural analysis with the MICMAC method & actors' strategy with MACTOR method. *Futures Research Methodology, American Council for the United Nations University: The Millennium Project*, 1 – 69
- Hamilton, K., Ruta, G. 2006. Measuring social welfare and sustainability. *Statistical Journal of the United Nations Economic Commission for Europe*, 23(4), 277–288. <http://dx.doi.org/10.3233/SJU-2006-23405>
- Handayani, F. and Warsono, H. 2017. Analisis peran stakeholders dalam pengembangan objek wisata pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management*. 6(1): 1–13.
- Hardian, D., Febryano, I.G., Supono, Damai, A.A., Winarno, G.D. 2020. Pelarangan cantrang: Strategi pengembangan keberlanjutan sumberdaya ikan di Teluk Lampung. *Journal of Tropical Marine Science*. 3(1): 21-27. doi : 10.33019/jour.trop.mar.sci.v3i1.1734
- Hasani, Q., Julian, D., Damai, A.A., Yudha, I.G., Diantari, R., Yuliana, D., Reza, M., Caesario, R., Putriani, R.B. 2024. Priority strategy in the development of sustainable capture fisheries in the Marine Protected Area of Kiluan Bay, Lampung, Indonesia. *Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation Bioflux*. 17(2): 764-774.
- Hasani, Q. 2012. Konservasi sumberdaya perikanan berbasis masyarakat, implementasi nilai luhur budaya Indonesia dalam pengelolaan sumberdaya alam. *Aquasains*. 1(1), 35-44.
- Ihsan , Wiyono, ES., Wisudo, S.H., Haluan, J. 2014. Pola musim dan daerah penangkapan rajungan (*portunus pelagicus*) di Perairan Kabupaten Pangkep. *Marine Fisheries*. 5(2): 193-200.
- Irawan, P. 2006. Penelitian kualitatif & kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial. *Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI*. Agustus 2006. ISBN 979-99184-2-1
- Iskandar, P., Rukayah, R.S., Suprpti, A. 2022. Morfologi dari kampung nelayan menjadi kampung bahari. *Jurnal Arsitektur Arcade*. 6(2): 190-198. doi: 10.31848/arcade.v6i2.970
- Isnawati N., Hartoko, A., Febrianto, S. 2023. Analisa Variabel Oseanografi dan Kebiasaan Makan terhadap Sebaran Spasial Rajungan (*Portunus pelagicus*) di Perairan Semarang. *Journal Of Maquares*. 10(1), 11-20.
- Kanedi, M. M., Rahardjo, P., Maulita, M. 2020. Aspek Biologi Rajungan (*Portunus pelagicus*) di Pesisir Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. *Buletin Jalanidhitah Sarva Jivitam*, 2(1), 49-56.

- Kangas MI. 2000. Synopsis of the biology and exploitation of the blue swimmer crab, *Portunus pelagicus* Linnaeus, in Western Australia. *Fish. Res. Rep. Fish.* 121:1-22.
- Khalik, I., Kusmana, C., Basuni, S. 2011. Analisis kelembagaan pengelolaan daerah penyangga taman nasional kerinci seblat: studi kasus di eks HPH PT Maju Jaya Raya Timber Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan.* 1(1), 1-9
- Kusdiantoro, K., Fahrudin, A., Wisudo, S.H., Juanda, B. 2019. Perikanan tangkap di Indonesia: Potret dan tantangan keberlanjutannya. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.* 14(2): 145-162. doi: 10.15578/jsekp.v14i2.8056
- Kusuma, A.H., Hasani, Q., Budiarto, A., Priyadi, H., Amri, K., Ma'mun, A., Wahyuni, E. 2024. Hubungan hasil tangkapan rajungan (*Portunus pelagicus*, linnaeus 1758) dengan kondisi hidro-oseanografi di perairan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. *Jurnal Perikanan Unram.* 14(1): 365-379. doi: 10.29303/jp.v14i2.782
- Lawrence, P.R., Lorsch, J.W. 1967. Differentiation and integration in complex organizations. *Administrative science quarterly.* 1-47. doi: 10.2307/2391211
- Leilani, A., Restuwati, I. 2016. Partisipasi nelayan dalam kelompok usaha bersama bidang penangkapan ikan (kasus pada KUB di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran). *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan.* 10(1): 60-70. doi: 10.33378/jppik.v10i1.68
- Madani, Muhlis. 2011. Dimensi Interaksi Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta. *Graha Ilmu.* 201. ISBN 978-979-756-736-1
- Martasuganda, S. 2003. Bubu (*Traps*). Serial Teknologi Penangkapan Ikan Berwawasan Lingkungan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. *Institut Pertanian Bogor. Bogor.* 52 hlm.
- Maulana, Issac. 2018. Keberlanjutan agribisnis kepiting rajungan di Kabupaten Pangkep. *Jurnal Agrisistem.* 14(2): 125-134.
- Mayu, D.H., Kurniawan., Wijayanto, D., Bambang, A.N. 2021. Pemanfaatan model bioekonomi terhadap sumberdaya rajungan (*Portubus pelagicus*) di perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology.* 17(1): 115-121.
- Mira, M., Firdaus, M., Reswati, E. 2014. Penerapan Prinsip Blue Economy pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan,* 9(1), 17-23.
- Menard, C., Shirley, M. M. (Eds.). 2005. Handbook of new institutional economics (Vol. 9). Dordrecht: *Springer.*

- North, Douglass C. 1991. Institutions. *Journal of Economic Perspectives*. 5(1): 97-112. doi: 10.1257/jep.5.1.97
- Nugroho, H. C., Zauhar, S., Suryadi, S. 2014. Koordinasi pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan di kabupaten Nganjuk. *Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development*, 5(1): 12-22.
- Nugroho Adi, F. B. 2021. Perspektif Eksploitasi dan Konservasi dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Indonesia. *Kementerian Kelautan dan Perikanan*. 17.
- Oktavia, S., Saharuddin. 2013. Hubungan peran stakeholders dengan partisipasi masyarakat dalam program agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(3): 231–246.
- Ostrom, E. 1986. An agenda for the study of institutions. *Public Choice*. 48(1): 3-25.
- Ostrom E. 1990. *Governing the Commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge: *Cambridge University Press*.
- Ostrom, E., Burger, J., Field, C.B., Norgaard, R.B., Policansky, D. 1999. Revisiting the commons: Local lessons, global challenges. *Science*. 284(5412):278-282. doi: 10.1126/science.284.5412.278.
- Pangaribuan, M.T., Munandar, A.I., 2021. Analisis stakeholder dalam kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jakarta periode tahun 2020. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*. 6(2):60-66
- Pejovich, S. 1999. The Effects of the interaction of formal and informal institutions on social stability and economic development. *Journal of Markets & Morality*. 2(2): 164-181.
- Pratiwi, W. B., Azizah, R., Nuraini, T. 2021. Kajian morfometri rajungan (*Portunus pelagicus*) linnaeus , 1758 (crustacea : *portunidae*) pada dua fase bulan yang berbeda di Perairan Desa Tunggulsari, Rembang. *Journal of Marine Research*. 10(1): 109–116. doi: 10.14710/jmr.v10i1.28 667
- Prasetyo, G. D., Fitri, A. D. P., Yulianto, T. 2014. Analisis daerah penangkapan rajungan (*Portunus pelagicus*) berdasarkan perbedaan kedalaman perairan dengan jaringarad (minitrawl) di Perairan Demak. *Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 3(3): 257–266
- Pusat Data, Statistik, dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2024. Data Statistik Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Tulang Bawang. <https://portaldata.kkp.go.id/datainsight/produksi-ikan-tangkap>. Diakses 12 Agustus 2024.
- Radiopoetro. 1986. *Zoologi Avertebrata*. Jakarta: *Erlangga*.

- Rakhmanda, A., Suadi, Djasmani, S. 2018. Peran kelompok nelayan dalam perkembangan perikanan di Pantai Sadeng Kabupaten Gunungkidul. *Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 6: 94-104. doi: 10.22500/sodality.v6i2.23225.
- Rees, G. H., MacDonell, S. G. 2017. Data gathering for actor analyses: A research note on the collection and aggregation of individual respondent data for MACTOR. *Future Studies Research Journal: Trends and Strategies*, 9(1), 115–137.
- Rochmah, S.F., Febryano, I.G., Kaskoyo, H., Widiastuti, E.L., Safe'i, R., Tresiana, N. 2022. Pemetaan Stakeholder dalam pengelolaan kawasan konservasi taman pesisir penyu, Pantai Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi. *Journal of Tropical Marine Science*. 5(2): 155-165.
- Romimohtarto, K., Juwana, S. 2001. Biologi Laut : Ilmu Pengetahuan Tentang Biota Laut. Jakarta: Djambatan.
- Safira, A., Zairion., Mashar, A. 2019. Analisis keragaman morfometrik rajungan (*Portunus pelagicus* Linnaeus, 1758) di WPP 712 sebagai dasar pengelolaan. *Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis*. 3(2): 9-19.
- Sainsbury, J.C. 1996. Commercial Fishing Methods an Introduction to Vessel and Gears. Third Edition. *Fishing News Books Ltd*. London. 359 hlm.
- Saputra, R.S.H., Iskandar, B.H., Kurniawati, V.R, Desrial, D., Purbayanto, A. 2022. Karakteristik teknis alat bantu penangkapan bubu rajungan di pesisir Kabupaten Karawang. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*. 28(3): 111-122. doi: 10.15578/jppi.28.3.2022.111-122
- Saraswati, N., Boesono, H., Setyanto, I. 2021. Analisis pengaruh perbedaan jenis umpan dan lama immersing terhadap hasil tangkapan pada alat tangkap bubu lipat di perairan Batang. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 9(2), 7-13.
- Setiyowati D, Sulistyawati DR. 2019. Analisis stok rajungan (*Portunus pelagicus* Linnaeus, 1758) di Pantai Utara Jepara, Provinsi Jawa Tengah. *Acta Aquatica: Aquatic Sciences Journal*. 6(2): 46-51. doi: 10.29103/aa.v6i2.1367
- Smith, A. D. M., Sainsbury, K. J., Stevens, R. A., 1999. Implementing Effective Fisheries-Management Systems – Management Strategy Evaluation and the Australian Partnership Approach. *ICES Journal of Marine Science*, 56: 967-979.
- Subehi, S., Boesono, H., Dewi, D.A.N.N. 2017. Analisis alat penangkap ikan ramah lingkungan berbasis code of conduct for responsible fisheries (CCRF) di TPI Kedung Malang Jepara. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*. 6(4): 01-20.

- Subianto A., Subagyo, H., Hindrajit, H. 2016. Tata kelola pemanfaatan sumber daya perikanan laut berbasis masyarakat. Surabaya: PT Menuju Insan Cemerlang.
- Sukarniati, L., Khoirudin, R. 2017. Analisis kelembagaan penerapan konsep blue economy pada tambak udang (studi kasus di Dusun Ngentak Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 3(2): 52-65.
- Suryawati, S.H., Wijaya, R.A., Zamroni, A., Huda, H.M., Koeshendrajana, S. 2023. Peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan, peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan. *Jurnal Pengelolaan sumber daya perikanan laut berkelanjutan*. 13(15): 315–346. doi: 10.55981/brin.908.c760.
- Suwarno, E., Yanti, R.N., Supeno, B. 2022. Pendampingan penyusunan organisasi dan kelembagaan pengelola obyek wisata alam pulau semut. dinamisia: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 6(3): 725-735. doi: 10.31849/dinamisia.v6i3.8290
- Tandio, T., Kusmana, C., Fauzi, A., Hilmi, E. 2023. Identification of key actors in mangroves plantation using the MACTOR Tool: Study in DKI Jakarta. *Jurnal Sylva Lestari*, 11(1), 163-176.
- Taurusman, A., Wiryawan, B., Basweni., Isdaharti. 2020. Dampak penangkapan terhadap ekosistem: landasan pengelolaan perikanan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Perikanan Laut dan Transportasi Maritim: Albacore*. 4(1): 109-118.
- Tharieq, M. A., Sunaryo, S., Santoso, A. 2020. Aspek morfometri dan tingkat kematangan gonad rajungan (*Portunus pelagicus*) linnaeus, 1758 (malacostraca: portunidae) di Perairan Betahwalang Demak. *Journal of Marine Research*. 9(1): 25–34. doi: 10.14710/jmr.v9i1.260 81
- Tresiana, N., Duadji, N., Febryano, I. G., Maharani, M. K., Rahmat, A. 2022. Regulatory impact analysis on mangrove forest in the coastal area of the Bandar Lampung. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 1027 (1). doi:10.1088/1755-1315/1027/1/012027
- Triswiyana I, Permatasari A, Juandi J, Kurniawan A. 2022. Peningkatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan Sinar Menumbing di Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*. 16(1): 15-31. doi: 10.33378/jppik.v16i1.287
- Uphoff N. 1986. Local institution development: An analytical sourcebook with cases. Connecticut: *Kumarian Press*.

- Uphoff, Norman. 1987. Local institutional development: An analytical sourcebook with cases. Rural Development Committee. Cornell University. *Kumarian Press*.
- Urrahma S, Eriyanti F. 2020.. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepemimpinan ketua KUB dalam memberdayakan nelayan di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*. 2(2): 34-43. doi: 10.24036/jmiap.v2i2.128
- Valentina A, Wardany K, Mariana E. 2020. Partisipasi masyarakat nelayan dalam pemberdayaan ekonomi di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. *Jurnal Masyarakat Maritim*. 4(1): 1-11. doi: 10.31629/jmm.v4i1.2566
- Wallis, J. J. 2017. What Institutions Are: The difference between Social Facts, Norms, and Institutions and their associated rules and enforcement. *Maryland: University of Maryland*.
- Wardono, B., Muhartono, R., Hikmayani, Y., Apriliani, T., Hikmah, H. 2019. Analisis Prospektif Peran Aktor dalam Strategi Formulasi Pembangunan Perikanan di Kabupaten Natuna. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 14(2), 179-195.
- Wijaya, A.I., Nainggolan, C., Baskoro, M. 2023. Strategi pembangunan penangkapan rajungan (*Portunus pelagicus*) dengan bubu di Muara Gembong Kabupaten Bekasi. *Buletin Jalanidhitah Sarva Jivitam*. 5(1): 1-9.
- Yin, Robert K. 2019. Studi Kasus : Desain dan Metode. Jakarta : *Rajawali Press*.
- Yunita, E., Pargito, Sinaga R.M. 2018. Kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan di Pantai Labuhan Jukung Krui pasca terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. *Jurnal Studi Sosial*. 6(1): 1-13.
- Yusuf, J., Rukmana, D., Alam, S., A., Nur Indar, Y. 2014. Studi kelembagaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan telur Ikan Terbang (Kasus Desa Pa Lalakang Kabupaten Takalar). *Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan*, 24(3), 19-28.
- Zairion, Z., Wardianto, Y., Fahrudin, A., Boer, M. 2015. Distribusi spasio-temporal populasi rajungan (*Portunus pelagicus*) betina mengerami telur di perairan pesisir Lampung Timur. *BAWAL Widya Riset Perikanan Tangkap*, 6(2), 95-102.
- Zulkarnain, Wahyu, RI., Wahyudi, T., Purwangka, F., Yuwandana, DP., Penggunaan bubu lipat modifikasi pada penangkapan rajungan (*Portunus sp.*) di Perairan Utara Pemalang, Jawa Tengah. *ALBACORE*. 3(2): 155-167.